

# PEMBANGUNAN SISTEM AGRIBISNIS SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI NASIONAL



**DEPARTEMEN PERTANIAN**  
**APRIL 2002**



## KATA PENGANTAR



Dalam rangka membangun ekonomi nasional, beberapa hal mendasar yang perlu dipertimbangkan adalah potensi dan keunggulan sumberdaya yang dimiliki, kondisi lingkungan strategis, sasaran yang akan dicapai dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Dilihat dari keunggulan Indonesia sebagai negara agraris dan maritim, yang secara eksplisit dicantumkan dalam GBHN 1999-2004, peran pertanian dan agribisnis sampai saat ini, serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi pada masa datang, tidak diragukan lagi bahwa agribisnis akan tampil menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Agribisnis mampu mengakomodasikan tuntutan agar perekonomian nasional terus bertumbuh dan sekaligus memenuhi prinsip kerakyatan, keberlanjutan dan pemerataan baik antar individu maupun antar daerah. Atas dasar pemikiran tersebut maka pembangunan sistem dan usaha agribisnis, hingga saat ini dipandang sebagai bentuk pendekatan yang paling tepat bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Namun demikian, pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang merupakan strategi besar (*grand strategy*) membutuhkan berbagai dukungan kebijaksanaan, baik berupa kebijaksanaan makro, kebijaksanaan regional, maupun kebijaksanaan khusus untuk memperkuat setiap sub-sistem yang tercakup dalam sistem agribisnis. Berbagai kebijaksanaan tersebut tentu saja melibatkan peran dan wewenang berbagai instansi atau organisasi baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, sehingga operasionalisasi strategi pembangunan sistem dan usaha agribisnis tersebut harus dilakukan secara terkoordinasi baik horizontal maupun vertikal.



Dokumen tentang "**Pembangunan Sistem Agribisnis Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional**" ini merupakan salah satu dokumen yang berisi pemikiran tentang strategi pembangunan ekonomi nasional melalui pendekatan agribisnis. Departemen Pertanian mempersiapkan dokumen ini secara khusus, selain untuk memberikan kerangka dasar pembangunan agribisnis secara lebih sistematis, juga untuk membangun koordinasi antar instansi dan organisasi yang lebih baik. Oleh karena itu saya menaruh harapan besar agar segenap unsur yang menjadi pelaku pembangunan ekonomi nasional, khususnya pembangunan agribisnis, dapat menjadikan dokumen ini sebagai bahan rujukan dalam pembuatan kebijaksanaan instansi/organisasinya masing-masing.

Khusus untuk seluruh unit organisasi yang ada dalam lingkup Departemen Pertanian, saya minta agar dokumen ini dapat disosialisasikan dan selanjutnya dijadikan acuan dalam menyusun program yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit organisasi. Terimakasih.

**Menteri Pertanian RI**



**Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.**



*“The Agricultural World And The Industrial World  
Are Not Two Separate Economies Having Merely  
A Buyer-Seller Relationship. Rather, They Are So  
Intertwined And Inseparably Bound Together That  
One Must Think Of Them Jointly If There Is To Be  
Any Sound Thinking About Either One Or The Other”  
(Davis & Goldberg, 1957)*



## DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
II.	POSISI STRATEGIS AGRIBISNIS DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA.....	5
	2.1. Amanat Konstitusi dan Landasan Politik.....	5
	2.2. Landasan Teoritis dan Fakta Empiris.....	8
	2.3. Peranan Agribisnis Dalam Perekonomian Nasional.....	10
III.	MASALAH DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN SISTEM DAN USAHA AGRIBISNIS .....	21
	3.1. Kelemahan Pembangunan Sistem Agribisnis Masa Lalu....	21
	3.2. Tantangan Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis ...	24
IV.	VISI, MISI, DAN TUJUAN PEMBANGUNAN SISTEM DAN USAHA AGRIBISNIS .....	31
	4.1. Pembangunan Sistem Agribisnis.....	31
	4.2. Pembangunan Usaha Agribisnis.....	34
	4.3. Arah Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis .....	34
	4.4. Misi Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis .....	44
	4.5. Tujuan Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis.....	45
V.	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SISTEM DAN USAHA AGRIBISNIS	47
	5.1. Kebijakan Makro .....	47
	5.2. Kebijakan Pengembangan Industri.....	50
	5.3. Kebijakan Perdagangan/Pemasaran dan Kerjasama Internasional .....	52
	5.4. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur .....	54
	5.5. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan .....	54



5.6. Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan .....	63
5.7. Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Agribisnis Daerah.....	65
5.8. Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan .....	66
VI. MANAJEMEN PEMBANGUNAN SISTEM DAN USAHA AGRIBISNIS.....	69
6.1. Peta Kewenangan .....	69
6.2. Mekanisme Manajemen .....	70



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) sebagai negara agraris dan maritim. Keunggulan komparatif tersebut merupakan fundamental perekonomian yang perlu didayagunakan melalui pembangunan ekonomi sehingga menjadi keunggulan bersaing (*competitive advantage*). Dengan begitu perekonomian yang dikembangkan di Indonesia memiliki landasan yang kokoh pada sumberdaya domestik, memiliki kemampuan bersaing dan berdayaguna bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selama ini, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan keunggulan komparatif tersebut telah berkembang di Indonesia dalam bentuk pembangunan pertanian yang merupakan salah satu sub-sistem agribisnis. Pengalaman di masa lalu membuktikan bahwa pembangunan pertanian saja yang tidak disertai dengan pengembangan industri hulu pertanian, industri hilir pertanian serta jasa-jasa pendukung secara harmonis dan simultan, tidak mampu mendayagunakan keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing. Meskipun Indonesia berhasil menjadi salah satu produsen terbesar pada beberapa komoditas pertanian dunia tetapi Indonesia belum memiliki kemampuan bersaing di pasar internasional. Selain itu, nilai tambah yang kita raih dari pemanfaatan keunggulan komparatif tersebut masih relatif kecil, sehingga tingkat pendapatan masyarakat tetap rendah.

Belajar dari pengalaman masa lalu tersebut, pendekatan pembangunan ekonomi dalam rangka mendayagunakan keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing perlu dirubah dari pembangunan pertanian kepada pembangunan sistem agribisnis di mana pertanian, industri hulu pertanian, industri hilir pertanian serta



sektor yang menyediakan jasa yang diperlukan, dikembangkan secara simultan dan harmonis.

Pembangunan sistem agribisnis tersebut perlu ditempatkan bukan hanya sebagai pendekatan baru pembangunan pertanian, tetapi lebih dari itu pembangunan sistem agribisnis perlu dijadikan sebagai penggerak utama (*grand strategy*) pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan (*agribusiness-led development*). Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis yakni : **Pertama**, membangun perekonomian yang berdaya saing berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara agraris dan maritim merupakan amanat konstitusi sebagaimana dimuat dalam GBHN 1999-2004; **Kedua**; data menunjukkan bahwa sistem agribisnis merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), kesempatan kerja dan berusaha serta dalam ekspor. Pada tahun 1995, kontribusi sistem agribisnis dalam PDB mencapai sekitar 48 persen, dalam penyerapan tenaga kerja mencapai 77 persen dan dalam total ekspor menyumbang 50 persen atau hampir 80 persen dari nilai ekspor non migas. **Ketiga**, sistem agribisnis merupakan sektor utama perekonomian daerah baik dalam pembentukan PDRB, kesempatan kerja dan berusaha maupun dalam ekspor daerah. Selain itu, sumberdaya ekonomi daerah yang paling siap didayagunakan dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi daerah saat ini adalah sumberdaya agribisnis; **Keempat**; dengan membangun sistem agribisnis maka secara in-heren (*built-in*) akan membangun sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman bahan pangan, budaya dan kelembagaan lokal. Pembangunan sistem ketahanan pangan (*food security*) yang kokoh perlu menjadi salah satu prioritas ke depan, karena sejarah membuktikan bahwa ketahanan pangan sangat berkaitan erat dengan ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi bahkan ketahanan nasional (*national security*) secara keseluruhan; **Kelima**, pembangunan sistem agribisnis berperan



penting dalam pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan sistem agribisnis yang berlangsung di setiap daerah, akan mampu menarik penyebaran penduduk dan segala aktivitasnya sehingga dapat mencegah tekanan penduduk yang berlebihan pada daerah tertentu. Selain itu dalam pembangunan sistem agribisnis tercakup pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan sistem agribisnis itu sendiri.

Dengan perkataan lain, dengan menempatkan pembangunan sistem agribisnis sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi nasional (*agribusiness-led development*) maka persoalan ekonomi Indonesia saat ini seperti pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan devisa, pemerataan, percepatan pembangunan ekonomi daerah, membangun ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan hidup, akan dapat dipecahkan sekaligus dan berkelanjutan.

Dalam rangka membangun perekonomian Indonesia melalui pembangunan sistem agribisnis ke depan dihadapkan pada dua tantangan besar yang perlu terakomodasikan dalam pembangunan sistem agribisnis. Tantangan yang dimaksud adalah: **Pertama**, liberalisasi perdagangan internasional yang membuka persaingan yang makin ketat, memerlukan peningkatan kemampuan bersaing; **Kedua**, pelaksanaan otonomi daerah yang di dalamnya menyangkut pengurangan peranan langsung pemerintah dan desentralisasi pembangunan, dan lain-lain menjadi hal yang sangat penting diakomodasikan dalam pembangunan sistem agribisnis.

Berdasarkan tantangan tersebut dan memperhatikan kondisi saat ini, visi pembangunan sistem agribisnis sebagai penggerak utama pembangunan nasional adalah: "**Terwujudnya perekonomian nasional yang sehat melalui pembangunan sistem dan usaha**



## **agribisnis yang berdaya saing berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi”.**

Dengan visi tersebut, ke depan kita akan membangun suatu sistem atau struktur agribisnis yang mencakup industri hulu pertanian, pertanian itu sendiri, industri hilir pertanian serta jasa-jasa pendukung; yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi. Selain itu, juga dikembangkan usaha-usaha agribisnis yang mencakup usaha rumah tangga, usaha kelompok, usaha kecil, usaha menengah, koperasi dan korporasi yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.

**Berdaya saing** dicirikan antara lain berorientasi pasar, meningkatkan pangsa pasar khususnya di pasar internasional dan mengandalkan produktivitas dan nilai tambah melalui pemanfaatan modal (*capital-driven*), pemanfaatan inovasi teknologi (*innovation-driven*) serta kreativitas sumberdaya manusia (*skill-driven*) dan bukan lagi mengandalkan kelimpahan sumberdaya alam dan tenaga kerja tak terdidik (*factor driven*).

**Berkerakyatan**, dicirikan antara lain dengan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki atau dikuasai rakyat banyak, menjadikan organisasi ekonomi dan jaringan organisasi ekonomi rakyat banyak menjadi pelaku utama pembangunan agribisnis, sehingga nilai tambah yang tercipta dinikmati secara nyata oleh rakyat banyak.

**Berkelanjutan** dicirikan antara lain memiliki kemampuan merespons perubahan pasar yang cepat dan efisien, berorientasi kepentingan jangka panjang, inovasi teknologi yang terus menerus, menggunakan teknologi ramah lingkungan dan mengupayakan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.



**Terdesentralisasi** dicirikan antara lain berbasis pada pendayagunaan keragaman sumberdaya lokal, berkembangnya kreativitas pelaku ekonomi lokal, memungkinkan pemerintah daerah sebagai pengelola utama pembangunan agribisnis dan meningkatkannya bagian nilai tambah yang dinikmati rakyat lokal.

Untuk mewujudkan sistem dan usaha agribisnis yang demikian diperlukan serangkaian kebijakan pembangunan sebagai berikut. **Pertama**, kebijakan makro ekonomi (moneter, fiskal) yang bersahabat dengan pembangunan sistem dan usaha agribisnis; **Kedua**, kebijakan pengembangan industri (*industry policy*) yang memberi prioritas pada pengembangan kluster industri (*industry cluster*) agribisnis. **Ketiga**, kebijakan perdagangan internasional (*trade policy*) yang netral baik secara sektoral domestik maupun antar negara dalam kerangka mewujudkan suatu *free trade yang fair trade*. **Keempat**, pengembangan infrastruktur (jalan, pelabuhan, listrik, telepon, pengairan) daerah. **Kelima**, pengembangan kelembagaan (*institutional policy*) baik lembaga keuangan, penelitian dan pengembangan, pendidikan sumberdaya manusia dan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan dan organisasi ekonomi petani; **Keenam**, pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan serta **Ketujuh**, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis daerah; **Kedelapan**, ketahanan pangan; dan **Kesembilan** kebijakan khusus komoditi spesifik.

Pembangunan sistem dan usaha agribisnis melibatkan banyak Departemen dan Lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Selain Departemen Pertanian, Kantor Menko Perekonomian, Depkeu, BI, Departemen Kehutanan, Departemen Perikanan dan Kelautan juga melibatkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, BULOG, Meneg Koperasi dan PPK, Departemen Prasarana Wilayah dan Pemukiman, Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi, BPPT, LIPI, Swasta dan lain-lain. Karena itu, untuk memberhasilkan



pembangunan sistem dan usaha agribisnis diperlukan **Forum Koordinasi Pangan dan Agribisnis Nasional** (FKPAN) di pusat dan **Forum Koordinasi Pangan dan Agribisnis Daerah** (FKPAD) di daerah untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program secara lintas sektoral dan antar pusat-daerah secara harmonis.

Pada tingkat pusat, Forum Koordinasi tersebut berfungsi untuk mengorkestra kebijakan dan program yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sesuai dengan UU 22 Tahun 1999 dan PP 25 Tahun 2000, secara lintas Departemen dan lintas Daerah propinsi. Pada tingkat propinsi, Forum Koordinasi tersebut berfungsi untuk mengorkestra program pembangunan sistem dan usaha agribisnis secara lintas kabupaten/kodya, sedangkan pada level kabupaten/kodya berfungsi mengorkestra program dan mensinkronisasi secara spasial dan timing antara seluruh *stakeholders* pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

Forum koordinasi pangan dan agribisnis tersebut di tingkat pusat dapat memanfaatkan Sidang Kabinet atau Sidang Koordinasi Perekonomian dengan menjadikan koordinasi pembangunan sistem dan usaha agribisnis sebagai agenda reguler. Sedangkan pada level propinsi dan kabupaten/kodya dapat memanfaatkan Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKORBANG) yang diperluas.

Apa yang akan dicapai dengan visi baru ini? **Pertama**, dengan pilihan strategi besar membangun sistem dan usaha agribisnis dengan konsep yang benar, perekonomian nasional dapat pulih dengan lebih cepat, dan dalam jangka panjang, ekonomi bertumbuh dengan laju setidaknya seperti sebelum krisis ekonomi, karena agribisnis adalah bisnis terbesar di negara kita—karena itu membangun agribisnis sebenarnya adalah membangun perekonomian bangsa. **Kedua**, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diiringi pemerataan, dengan keseimbangan sektoral yang harmonis. Ketimpangan pendapatan



antar sektor dan antar daerah dapat diatasi, dan kenaikan pendapatan terjadi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) termasuk petani. Dengan pemerataan, masalah-masalah sosial sekaligus dapat dipecahkan. **Ketiga**, di masa mendatang akan terjadi penciptaan tenaga kerja (*meaningful employment*) di luar sektor pertanian (*on-farm*), terutama di subsistem agroindustri dan pemasaran, menyerap tenaga kerja yang dilepas dari sektor pertanian, sehingga produktivitas sektor pertanian meningkat. **Keempat**, ekspor akan meningkat dan lebih beragam, dengan komposisi secara bertahap mengarah ke produk-produk olahan yang bernilai tambah tinggi. Hal ini sekaligus akan menciptakan permintaan (*derived demand*) akan bahan baku dari pertanian, yang pada gilirannya meningkatkan produksi pertanian. **Kelima**, dengan membangun agribisnis yang berbasis pada keragaman sumberdaya hayati di setiap daerah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi dan keseimbangan gizi yang mempertimbangkan budaya dan kelembagaan lokal, secara *built-in* juga terbangun ketahanan pangan yang kokoh. Dan **keenam**, mengingat saat ini agribisnis merupakan penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi setiap daerah, maka melalui percepatan modernisasi agribisnis di setiap daerah akan secara langsung memodernisasi perekonomian daerah dan dapat memecahkan sebagian besar persoalan ekonomi di daerah—hal yang relevan dengan semangat desentralisasi sesuai dengan Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Kita sangat mengharapkan visi baru ini menjadi visi nasional sehingga di masa mendatang pembangunan nasional akan digerakkan oleh agribisnis (*agribusiness led development*).



## I. PENDAHULUAN

Kelemahan strategi pembangunan pertanian di masa lalu dan krisis ekonomi yang berkepanjangan, telah menimbulkan berbagai persoalan sangat parah dalam perekonomian Indonesia. Masalah kemiskinan, pengangguran, pendapatan yang rendah, ketimbangan ekonomi, ketahanan pangan, hutang luar negeri yang terlalu besar, kemerosotan mutu lingkungan hidup dan ketertinggalan perekonomian daerah, merupakan sederetan ekonomi yang sangat melilit perekonomian Indonesia.

Untuk memecahkan persoalan ekonomi yang begitu kompleks, Indonesia memerlukan penajaman (*focusing*) strategi pembangunan ekonomi yang diharapkan mampu memberi solusi atas persoalan yang ada, tanpa menimbulkan persoalan yang baru. Oleh karena itu, strategi yang dipilih hendaknya memiliki karakteristik (*attributes*) sebagai berikut. **Pertama;** strategi yang dipilih haruslah memiliki jangkauan kemampuan memecahkan masalah ekonomi yang luas sedemikian rupa, sehingga sekali strategi yang bersangkutan diimplementasikan, sebagian besar persoalan ekonomi dapat terselesaikan; **Kedua;** strategi yang dipilih untuk diimplementasikan, tidak mengharuskan penggunaan pembiayaan eksternal (pinjaman luar negeri dan impor) yang terlalu besar sehingga tidak menambah utang luar negeri yang telah begitu besar saat ini dan menciptakan ketergantungan baru; **Ketiga;** strategi yang dipilih hendaknya tidak dimulai dari nol melainkan dapat memanfaatkan hasil-hasil pembangunan sebelumnya. Sehingga selain tidak menimbulkan kegamangan didalam masyarakat, juga hasil-hasil pembangunan tidak menjadi sia-sia; **Keempat;** strategi yang dipilih untuk diimplementasikan, mampu membawa perekonomian Indonesia ke masa depan yang lebih cerah dimana Indonesia mampu menjadi saling



sinergis (*interdependency economy*) dengan perekonomian dunia dan bukan perekonomian yang tergantung (*dependency economy*).

Dalam pada itu situasi ke depan akan sangat berbeda dengan sekarang dan masa lalu. **Pertama;** di masa lalu sumber pertumbuhan ekonomi didominasi oleh pinjaman luar negeri, di masa mendatang arus dana pinjaman akan semakin sulit karena beban hutang sudah *overloaded* seperti yang pernah dialami oleh negara-negara Meksiko, Brasil dan Agrintina di masa lalu; **Kedua;** reformasi perdagangan global menciptakan peluang pasar karena hambatan tarif dan subsidi yang semakin longgar tetapi persaingan akan semakin ketat, karena hambatan non-tarif khususnya di bidang mutu semakin meningkat; **Ketiga;** adanya otonomi daerah memaksa pergeseran paradigma pembangunan dari sentralistis ke desentralistis; **Keempat;** adanya kesadaran dan tendensi kuat bahwa pelaku pembangunan adalah masyarakat luas. Pemerintah akan lebih berperan untuk mendorong dan menciptakan iklim kondusif dalam berusaha-*teering rather dan rowing*.

Dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, guna menjamin terciptanya fundamental ekonomi yang *solid* Indonesia harus mampu mengidentifikasi pilihan strategi untuk dapat menggerakkan perekonomian nasional dengan cepat. Pilihan tersebut haruslah mengandalkan sektor-sektor yang didukung oleh sumberdaya domestik. Di antara sektor yang mengandalkan sumberdaya domestik dan mempunyai peluang usaha baru adalah bidang agribisnis, yang merupakan sinergi antara pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dengan pembangunan industri hulu dan hilir pertanian serta pembangunan sektor jasa yang terkait didalamnya. Oleh karena itu investasi harus difokuskan ke bidang agribisnis, termasuk infrastruktur pendukungnya agar diperoleh *economic return* dan distribusi *income* yang tinggi.



Strategi pembangunan sistem agribisnis yang antara lain bercirikan berbasis pada pendayagunaan keragaman sumberdaya yang ada di setiap daerah (*domestic resource based*) akomodatif terhadap keragaman kualitas sumberdaya manusia yang kita miliki, tidak terlalu mengandalkan impor dan pinjaman luar negeri yang besar, berorientasi ekspor (selain memanfaatkan pasar domestik) dan aspek *multifunctionality* yang diperankannya, diperkirakan mampu memecahkan sebagian besar (seluruh) persoalan ekonomi yang ada. Selain itu strategi pembangunan agribisnis yang secara bertahap akan bergerak dari mengandalkan sumberdaya alam dan SDM belum terampil (*factor driven*), kepada pembangunan agribisnis yang digerakkan oleh barang-barang modal dan SDM makin terampil (*capital driven*) dan kemudian pada pembangunan yang mengandalkan IPTEK dan sumberdaya manusia terampil (*innovation driven*) diyakini mampu mengantarkan perekonomian Indonesia memiliki daya saing dan saling sinergis dengan perekonomian dunia masa depan. Dengan perkataan lain, strategi pembangunan agribisnis diyakini mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) perekonomian Indonesia untuk keluar dari krisis dan mengejar kecemerlangan ekonomi di masa depan.

Dengan demikian, masalah kita lima (5) sampai 25 tahun ke depan adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi, yang didalamnya terdapat perubahan struktur yang seimbang tanpa merusak sumberdaya lingkungannya, dengan indikasi pengurangan kemiskinan.

Membangun sistem dan usaha agribisnis yang kokoh berarti membangun pertumbuhan sekaligus pemerataan sehingga terjadi keseimbangan antar sektor. Ini juga berarti menciptakan *meaningful employment* di luar sektor pertanian (*subsistem on farm*), sehingga beban pertanian yang terlalu berat menampung tenaga kerja dapat teratasi. Karena sebagian besar sumberdaya terdapat di daerah pedesaan maka dengan membangun sistem dan usaha agribisnis



sekaligus juga membangun daerah, sehingga ketimpangan kota-desa teratasi. Migrasi dari desa ke kota dapat dicegah secara alamiah karena kesempatan kerja tersedia di desa.

Membangun sistem dan usaha agribisnis merupakan pekerjaan besar karena agribisnis itu sendiri merupakan sektor besar (*mega sector*). Maka diperlukan rancangan kebijakan lintas sektor secara sinergis, dengan dukungan kuat kebijakan makro.

Dengan pilihan strategi besar membangun sistem dan usaha agribisnis dengan konsep yang benar, perekonomian nasional dapat pulih dengan lebih cepat, dan dalam jangka panjang, ekonomi bertumbuh dengan sehat, diiringi pemerataan, dengan keseimbangan sektoral yang harmonis. Dengan demikian, di masa mendatang pembangunan nasional akan digerakkan oleh agribisnis (*agribusiness led development*).

Dalam buku ini akan diuraikan 5 (lima) pokok bahasan tentang pembangunan sistem agribisnis sebagai penggerak ekonomi nasional, yakni: (1) Posisi strategis sistem agribisnis dalam pembangunan ekonomi Indonesia; (2) Masalah dan tantangan pembangunan sistem dan usaha agribisnis; (3) Visi dan misi pembangunan sistem agribisnis; (4) Kebijakan pembangunan sistem dan usaha agribisnis; dan (5) Manajemen pembangunan sistem dan usaha agribisnis.



## **II. POSISI STRATEGIS AGRIBISNIS DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA**

Pembangunan agribisnis memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dilihat baik dari sisi konstitusional, landasan teoritis dan fakta empiris tentang urgensi sektor agribisnis sebagai sektor andalan, maupun peranannya dalam perekonomian Indonesia.

### **2.1. Amanat Konstitusi dan Landasan Politis**

Indonesia sebagai negara yang dibangun di atas konstitusi UUD 1945, haruslah mendasarkan pembangunannya termasuk pembangunan ekonomi pada amanat konstitusi dasar. Dengan demikian, ekonomi modern yang dibangun di atas bumi Indonesia tetap konsisten dengan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bidang ekonomi, pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa sistem perekonomian yang dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi ekonomi yakni pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Pembangunan ekonomi haruslah menggunakan sumberdaya yang dimiliki dan atau dikuasai oleh rakyat banyak. Sumberdaya yang dimiliki atau dikuasai oleh rakyat Indonesia adalah sumberdaya manusia (tenaga, pikiran, waktu, nilai-nilai, dan sebagainya) dan sumberdaya alam (lahan, keanekaragaman hayati, agroklimat tropis, dan lain-lain). Kedua sumberdaya tersebut merupakan keunggulan komparatif (*comparative advantages*) yang dimiliki Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan ekonomi Indonesia haruslah berbasiskan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Hanya dengan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dimungkinkan jumlah penduduk, keanekaragaman sosial budaya masyarakat, dan



sumberdaya alam dapat menjadi subyek dan modal pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan bukanlah mengesampingkan pemanfaatan sumberdaya modal (*capital*), teknologi maju, teknologi informasi, dan manajemen modern. Sumberdaya modal dan teknologi jelas sangat (harus) diperlukan, namun tetap dalam kerangka pemanfaatan sumberdaya alam melalui pendayagunaan kemampuan sumberdaya manusia. Demikian pula, sumberdaya impor jelas diperlukan terutama sumberdaya yang belum mampu diproduksi di dalam negeri. Namun, penggunaan sumberdaya impor tetap dalam upaya memperkuat kemampuan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam domestik.

Pelaku ekonomi dalam pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan adalah rakyat secara langsung baik secara individu maupun dalam bentuk organisasi ekonomi seperti koperasi, usaha kecil, menengah, besar dan BUMD/N. Pelaksanaan pembangunan ekonomi yang menempatkan rakyat hanya sebagai pelengkap jelas bertentangan dengan amanat konstitusi. Dalam implementasinya, bukan berarti perusahaan swasta asing tidak boleh ikut sebagai pelaku ekonomi nasional. Partisipasi swasta asing jelas diperbolehkan dalam pembangunan ekonomi nasional, namun tetap dalam kerangka memperkuat organisasi ekonomi rakyat dan bukan menggantikan atau menyingkirkannya.

Pembangunan ekonomi nasional ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat luas. Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan yakni melalui pendapatan atas faktor produksi yang dimiliki rakyat dan keuntungan pelaku ekonomi (organisasi ekonomi). Bila pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan sumberdaya domestik dalam kerangka organisasi ekonomi kerakyatan, maka hasil pembangunan



berupa gaji, upah, sewa, royalti, rent, profit secara otomatis akan dinikmati rakyat Indonesia.

Amanat konstitusi tersebut secara politis makin dipertegas dalam GBHN 1999-2004 yang mengamanatkan arah pembangunan ekonomi nasional sebagai berikut: (1) Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah (terutama pertanian dalam arti luas); (2) Memberdayakan pengusaha kecil menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdayasaing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha seluas-luasnya; (3) Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal; (4) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan dayaasaing produk yang berbasis sumberdaya lokal; (5) Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah; dan (6) Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat.

Mengingat sumberdaya yang dimiliki rakyat di setiap daerah adalah sumberdaya agribisnis (sumberdaya manusia, lahan, perairan, keanekaragaman hayati, dan lain-lain) dan hampir 90 persen usaha kecil, menengah dan koperasi berada pada agribisnis maka pembangunan ekonomi nasional yang sesuai dengan amanat konstitusi adalah pembangunan sistem agribisnis.



## 2.2. Landasan Teoritis dan Fakta Empiris

Sektor andalan perekonomian ialah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan tinggi sehingga dijadikan sebagai tumpuan harapan pembangunan ekonomi dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Sektor andalan merupakan tulang punggung dan penggerak perekonomian, sehingga dapat juga disebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin perekonomian nasional. Dengan demikian, sektor andalan merupakan refleksi dari suatu struktur perekonomian, sehingga dapat pula dipandang sebagai salah satu aspek penciri atau karakteristik dari suatu perekonomian.

Secara umum, syarat keharusan agar suatu sektor layak dijadikan sebagai andalan perekonomian nasional ialah memiliki kontribusi yang dominan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dalam pencapaian tujuan pembangunan perekonomian nasional. Sektor agribisnis jelas memiliki peranan yang sangat dominan, khususnya dalam hal pemantapan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan. Kesemuanya ini merupakan tujuan pembangunan ekonomi yang sangat penting, dan bahkan lebih penting daripada peranan dalam kontribusi dan pertumbuhan PDB, dimana saat ini kontribusi sektor agribisnis dalam PDB tidak lagi dominan dan cenderung mengalami penurunan.

Secara rinci ada lima syarat suatu sektor dapat dikatakan sebagai sektor andalan perekonomian nasional, yaitu tangguh, progresif, ukurannya cukup besar, artikulatif dan responsif. Kelima syarat khusus tersebut harus dipenuhi agar suatu sektor dapat menjadi sektor andalan perekonomian nasional. Pembangunan agribisnis diyakini dapat memenuhi persyaratan tersebut secara simultan, sehingga diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan agribisnis sebagai



sektor andalan diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan penanganan lingkungan secara inklusif dan integratif.

Ketangguhan sektor agribisnis diindikasikan oleh kemampuannya untuk tumbuh secara positif (0,22%) pada saat krisis (1998) sementara perekonomian nasional secara agregat mengalami kontraksi yang sangat hebat, yaitu sebesar 13,7 persen. Konsekuensi kontraksi ekonomi adalah penurunan penyerapan tenaga kerja nasional sebesar 2,13 persen, atau sebesar 6.429.500 orang. Semua sektor ekonomi (kecuali listrik) mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja, sementara itu sektor agribisnis justru mampu meningkatkan kapasitas penyerapan tenaga kerja sebanyak 432.350 orang. Fakta empiris ini menunjukkan bahwa sektor agribisnis merupakan sektor yang paling tangguh dalam menghadapi krisis dan paling berjasa dalam menampung pengangguran sebagai akibat krisis ekonomi.

Pada tahun 1998, peranan sektor agribisnis dalam pembentukan GDP nasional berada pada urutan kedua setelah industri yaitu sebesar 18,84 persen. Peranannya dalam penyerapan tenaga kerja nasional menempati urutan pertama yaitu 45,0 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Kesenjangan produktivitas tenaga kerja antara sektor pertanian dengan non-pertanian cukup besar yaitu sekitar empat kali lipat dan tingkat pengangguran di wilayah pedesaan lebih besar dibanding wilayah perkotaan. Ini berarti bahwa sektor agribisnis mempunyai arti strategis dan peran dominan dalam mengatasi pengangguran nasional dan mengurangi kesenjangan produktivitas antar sektor. Implikasi dari fakta tersebut adalah peningkatan pertumbuhan sektor agribisnis akan berdampak langsung yang kuat dan mampu mengatasi permasalahan struktur ekonomi nasional.



Kemampuan artikulatif dan responsif sektor agribisnis dapat dilihat dari keterkaitan konsumsinya. Semua sub-sektor dalam lingkup sektor agribisnis termasuk dalam katagori penyerapan tenaga kerja sedang sampai tinggi. Pangsa pengeluaran konsumsi rumah tangga pertanian sebesar 48,01 persen lebih tinggi dibanding rumah tangga non pertanian kota dan desa yang masing-masing sebesar 42,53 persen dan 30,63 persen. Elastisitas pengeluaran rumah tangga pertanian untuk konsumsi makanan adalah lebih tinggi dibandingkan rumah tangga non-pertanian. Ini berarti bahwa dampak peningkatan pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi bagi rumah tangga pertanian lebih tinggi daripada rumah tangga non-pertanian. Implikasi dari fakta tersebut adalah bahwa peningkatan pendapatan rumah tangga pertanian sangat penting dalam membangun keterkaitan konsumsi. Bukti empiris juga menunjukkan bahwa agroindustri skala kecil dan menengah yang bergerak di sektor makanan, perikanan, dan peternakan merupakan sektor komplemen yang dapat dikembangkan untuk mengartikulasikan sektor pertanian. Sektor agroindustri ini merupakan pilar strategis pembangunan sektor pertanian andalan.

### **2.3. Peranan Agribisnis Dalam Perekonomian Nasional**

Kontribusi sektor agribisnis dalam perekonomian dapat diukur dengan berbagai indikator seperti kontribusinya dalam pembentukan GDP, kesempatan kerja, dan perdagangan internasional. Disamping itu peranannya juga dapat dilihat dari kontribusinya dalam pembangunan ekonomi daerah, ketahanan pangan nasional dan pelestarian lingkungan hidup.

#### **2.3.1. Peranan Dalam Pembentukan GDP**

Sektor agribisnis merupakan penyumbang nilai tambah (*value added*) terbesar dalam perekonomian nasional. Sekitar 45 persen dari total nilai tambah yang tercipta dalam perekonomian nasional tahun

1990 dihasilkan dari sektor agribisnis. Pada tahun 1995 kontribusi sektor agribisnis dalam nilai tambah meningkat menjadi 47 persen dari total nilai tambah (Tabel 1). Hal ini berarti sektor agribisnis merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan nilai tambah total (GDP total) dan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, cara yang paling efektif untuk meningkatkan GDP nasional adalah melalui pembangunan sektor agribisnis.

**Tabel 1:** Kontribusi Agribisnis Dalam Pembentukan Nilai Tambah Ekonomi Indonesia. (Berdasarkan Tabel I-O 1990 dan 1995)

No.	Sektor	1990		1995	
		Rp. Milyar	Persen	Rp. Milyar	Persen
1.	Agribisnis	97.787.596	45,37	254.821.256	47,58
2.	Tambang & Galian	25.633.990	11,89	41.109.232	7,68
3.	Industri lain	27.485.892	12,75	48.580.888	9,07
4.	Listrik, Gas, Air	1.485.892	0,69	5.780.180	1,08
5.	Bangunan	11.795.231	5,47	35.748.200	6,67
6.	Angkutan/Transport	11.536.967	5,35	31.414.862	5,87
7.	Komunikasi	1.541.568	0,72	5.750.649	1,07
8.	Lembaga Keuangan	8.407.578	3,90	23.890.420	4,46
9.	Jasa	29.855.928	13,85	88.481.024	16,52
<b>TOTAL</b>		<b>215.530.642</b>	<b>100,0</b>	<b>535.576.711</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, Tabel I-O 1990 dan 1995, (diolah)

Dalam periode 1996-1999, GDP sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 0,84 persen per tahun, yaitu dari Rp 63,8 triliun menjadi Rp 65,4 triliun dengan harga konstan 1993. Sementara sektor ekonomi secara keseluruhan menurun sebesar 2,97 persen per tahun. Pada tahun 1999 pangsa GDP pertanian menempati posisi kedua terbesar setelah industri pengolahan, yaitu 19,4 persen vs 25,78 persen. Struktur pendapatan rumah tangga tahun 1999 menunjukkan bahwa kontribusi kegiatan usahatani (*on-farm*) dan luar usahatani (*off-farm*) adalah 54,35 persen dan 6,10 persen. Sumber kegiatan



non-pertanian didominasi oleh kegiatan industri dan berburuh yang peranannya pada tahun 1999 mencapai 16,44 persen dan 8,78 persen. Informasi ini menunjukkan peran dominan kegiatan pertanian dalam struktur ekonomi rumah tangga pedesaan dan pertumbuhan perekonomian nasional.

### **2.3.2. Peranan Dalam Penyerapan Tenaga Kerja**

Berdasarkan Tabel Input-Output 1990 dan 1995, kontribusi sektor agribisnis dalam penyerapan tenaga kerja tahun 1990 mencapai sekitar 74 persen dan kemudian meningkat menjadi 77 persen tahun 1995 (Tabel 2). Hal ini berarti cara yang paling tepat untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha di Indonesia adalah melalui pembangunan agribisnis. Kontraksi perekonomian agregat pada tahun 1998 menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja nasional sebesar 2,13 persen atau sekitar 6,43 juta orang. Penyerapan tenaga kerja sektor pertambangan dan galian turun sebesar 290,5 ribu orang (-32,4%), sektor industri manufaktur turun sebesar 1,38 juta orang (-12,36%), sektor bangunan turun sebesar 1,75 juta orang (-41,62%), perdagangan dan hotel turun 2,27 juta orang (-13,22%), sektor keuangan, persewaan turun sebesar 141,7 juta orang (-13,10%). Namun penyerapan tenaga kerja sektor pertanian naik sebesar 432,5 ribu orang atau sekitar 1,21 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor agribisnis mampu mengurangi beban pengangguran nasional akibat krisis ekonomi.

Struktur kesempatan kerja pedesaan tahun 1997 secara agregat menunjukkan bahwa peranan sektor pertanian tetap penting dengan proporsi 58,78 persen dari kesempatan kerja pedesaan yang besarnya 57,48 juta orang. Peranan sektor pertanian di luar Jawa nampak lebih besar dibandingkan dengan di Jawa (66,90% vs 50,65%) dan sebaliknya untuk sektor non-pertanian (33,10% vs 49,35%). Kegiatan di luar sektor pertanian yang umum dilakukan



masyarakat pedesaan adalah perdagangan, jasa kemasyarakatan, bangunan, dan jasa pengangkutan/komunikasi masing-masing dengan proporsi 13,63 persen, 8,27 persen, 4,13 persen, dan 3,31 persen. Keadaan ini menunjukkan masih tetap dominan peran sektor pertanian dalam perekonomian rumah tangga pedesaan, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Kegiatan di luar sektor pertanian yang relatif kecil dan sedang bertumbuh, tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan keberhasilan atau kinerja pembangunan pertanian.

**Tabel 2:** Kontribusi Agribisnis Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (Berdasarkan Tabel I-O 1990 dan 1995)

NO.	Sektor	1990		1995	
		Jumlah Orang	Persen	Jumlah Orang	Persen
1.	Agribisnis	55.420.841	74,61	71.959.908	77,34
2.	Tambang & Galian	698.138	0,94	1.012.195	1,09
3.	Industri lain	1.992.439	2,68	2.273.959	2,44
4.	Listrik, Gas, Air	136.789	0,18	151.918	0,16
5.	Bangunan	2.872.043	3,87	3.273.129	3,52
6.	Angkutan/transport	2.495.401	3,36	2.920.565	3,14
7.	Komunikasi	72.677	0,10	76.064	0,08
8.	Lembaga Keuangan	230.855	0,31	254.941	0,27
9.	Jasa	10.358.696	13,95	11.117.933	11,95
<b>TOTAL</b>		<b>74.277.897</b>	<b>100,0</b>	<b>93.040.612</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, Tabel 1990 dan 1995, (diolah)

### 2.3.3. Peranan Dalam Sektor Perdagangan

Dalam ekspor nasional, sektor agribisnis juga penyumbang terbesar. Kontribusi agribisnis dalam ekspor total Indonesia mencapai 43 persen pada tahun 1990 dan meningkat menjadi sekitar 49 persen pada tahun 1995 (Tabel 3). Dalam impor total Indonesia, pangsa impor sektor agribisnis relatif kecil dan cenderung menurun. Pada tahun 1990 pangsa impor sektor agribisnis hanya sekitar 24 persen dan menurun menjadi sekitar 16 persen pada tahun 1995 (Tabel 4). Hal ini berarti sektor agribisnis merupakan penyumbang terbesar



dalam devisa negara (*net ekspor*) dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Ekspor produk sektor pertanian juga mengalami peningkatan yang cukup besar selama krisis ekonomi. Dibandingkan dengan ekspor tahun 1997, ekspor pertanian tahun 1998 naik sebesar 26,5 persen. Peningkatan ekspor pertanian selama masa krisis (1991-1998) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata sebelum krisis yakni hanya sebesar 4,5 persen per tahun (1982-1997). Sebaliknya ekspor produk manufaktur turun sebesar 4,2 persen selama tahun 1997-1998. Hampir semua ekspor produk industri berbahan baku impor turun kecuali semen. Namun ekspor produk agroindustri yang berbasis pada sumberdaya lokal seperti minyak atsiri, asam lemak, barang anyaman (kecuali minyak sawit) mengalami peningkatan. Ekspor minyak sawit memang mengalami penurunan selama periode tahun 1997-1998 akibat pengenaan pajak ekspor yang mencapai rata-rata 40 persen bahkan sempat diberlakukan embargo ekspor.

**Tabel 3:** Sumbangan Agribisnis Dalam Ekspor Indonesia  
(Berdasarkan Tabel I-O 1990 dan 1995)

NO.	Sektor	1990	1995
		Persen	Persen
1.	Agribisnis	43,38	49,22
2.	Tambang & Galian	24,89	15,03
3.	Industri lain	23,35	22,56
4.	Listrik, Gas, Air	0,00	0,00
5.	Bangunan	0,00	0,00
6.	Angkutan/transport	4,23	7,02
7.	Komunikasi	0,06	0,47
8.	Lembaga Keuangan	3,41	3,96
9.	Jasa	0,68	1,74
<b>TOTAL</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Sumber: BPS, Tabel 1990 dan 1995, (diolah)



Bukti empiris kontribusi agribisnis dalam perekonomian Indonesia tersebut di atas mengungkapkan bahwa suatu pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha dan peningkatan devisa negara di Indonesia akan dapat dicapai melalui pembangunan agribisnis.

**Tabel 4:** Peranan Impor Agribisnis Dalam Impor Indonesia (Berdasarkan Tabel I-O 1990 dan 1995)

NO.	Sektor	1990	1995
		Persen	Persen
1.	Agribisnis	24,75	16,76
2.	Tambang & Galian	1,23	2,84
3.	Industri lain	41,92	64,77
4.	Listrik, Gas, Air	0,99	0,00
5.	Bangunan	17,44	0,00
6.	Angkutan/transport	4,34	5,29
7.	Komunikasi	4,13	1,07
8.	Lembaga Keuangan	2,87	3,15
9.	Jasa	6,32	6,11
<b>TOTAL</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Sumber: BPS, Tabel 1990 dan 1995, (diolah)

### 2.3.4. Peranan Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Tujuan pokok dari pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana maksud dari UU No 22 tahun 1999 dan PP No 25 tahun 2000 adalah mempercepat perkembangan ekonomi daerah. Cara yang paling efektif dan efisien untuk membangun ekonomi daerah adalah melalui pendayagunaan berbagai sumberdaya ekonomi yang tersedia di setiap daerah.

Pada saat ini sumberdaya ekonomi yang dimiliki di setiap daerah dan siap didayagunakan untuk pembangunan ekonomi daerah



adalah sumberdaya agribisnis seperti sumberdaya alam (lahan, air, keragaman hayati, agro-klimat), sumberdaya manusia di bidang agribisnis, teknologi di bidang agribisnis dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk membangun ekonomi daerah pilihan yang paling rasional adalah melalui percepatan pembangunan agribisnis. Dengan kata lain, pembangunan agribisnis dijadikan pilar pembangunan ekonomi wilayah.

Pembangunan agribisnis sebagai pembangunan ekonomi di daerah makin relevan pula, mengingat saat ini agribisnis merupakan penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi hampir setiap daerah. Sektor agribisnis adalah penyumbang terbesar dalam PDRB dan ekspor daerah. Demikian juga dalam penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha di setiap daerah, sebagian besar disumbang oleh sektor agribisnis. Karena itu, melalui percepatan modernisasi agribisnis di setiap daerah akan secara langsung memodernisasi perekonomian daerah dan dapat memecahkan sebagian besar persoalan ekonomi di daerah.

### **2.3.5. Peranan Dalam Ketahanan Pangan Nasional**

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan pangan (*food security*), sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial (*socio-security*), stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional (*national security*) secara keseluruhan. Kelemahan dalam mewujudkan ketahanan pangan akan dengan mudah menggoyahkan ketahanan sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional. Selain itu, ketahanan pangan dalam arti keterjangkauan pangan juga sangat berkaitan erat dengan upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia. Tanpa dukungan pangan yang bermutu dan cukup, tidak mungkin dihasilkan sumberdaya manusia yang bermutu. Karena itu membangun sistem



ketahanan pangan yang kokoh merupakan syarat mutlak bagi pembangunan nasional.

Dalam membangun ketahanan pangan penyediaan pangan dapat diperoleh melalui impor. Namun untuk kondisi Indonesia dimana jumlah penduduknya yang cukup besar dan keragaman sosial budaya yang ada, menggantungkan penyediaan bahan pangan dari pasar internasional akan beresiko tinggi. Selain memerlukan devisa yang cukup besar, juga berhadapan dengan pasar bahan pangan utama dunia yang tipis (*thin market*), dimana bahan pangan yang diperdagangkan di pasar internasional hanya sedikit sekali (sekitar 10-20% dari total produksi dunia). Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia kecuali membangun sistem ketahanan pangan yang berakar kokoh pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal.

Produksi pangan domestik telah menunjang sebagian besar penyediaan berbagai pangan nasional. Beberapa komoditas pangan pokok seperti beras dan jagung telah mencukupi kebutuhan masyarakat, sedangkan gula pasir dan kedele masih mengalami defisit. Untuk komoditi ubikayu bahkan mengalami surplus yang cukup tinggi. Keseimbangan antara produksi dengan kebutuhan pangan tersebut bisa dipergunakan untuk mengukur derajat swasembada pangan. Sebagai ilustrasi rasio produksi dan kebutuhan beras, jagung, kedelai, dan ubikayu secara nasional tahun 1999 adalah 0,99; 0,98; 0,58, dan 1,23.

Pembangunan agribisnis sangat besar peranannya dalam menunjang terwujudnya sistem ketahanan pangan yang kokoh. Dengan membangun agribisnis yang berbasis pada keragaman sumberdaya hayati di setiap daerah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi dan keseimbangan gizi yang mempertimbangkan budaya dan kelembagaan lokal, secara *built-in* juga terbangun ketahanan pangan yang kokoh.

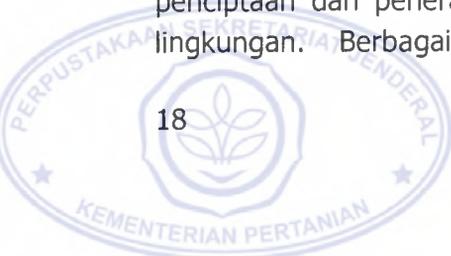


### 2.3.6. Peranan Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

Dewasa ini, keprihatinan akan kemerosotan mutu lingkungan hidup bukan lagi sebatas isu lokal atau negara melainkan sudah menjadi keprihatinan masyarakat internasional. Kemerosotan mutu lingkungan hidup saat ini telah sampai pada tingkat yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia di bumi. Karena itu diperlukan upaya secara internasional, regional dan lokal untuk mengatasi kemerosotan mutu lingkungan hidup.

Pembangunan agribisnis potensial untuk mencegah dan memperbaiki kemerosotan mutu lingkungan hidup melalui hal-hal berikut: *Pertama*, pembangunan agribisnis akan membuka kesempatan-kesempatan ekonomi yang luas di setiap daerah (ruang). Kesempatan ekonomi tersebut akan menarik penyebaran penduduk beserta aktivitasnya, sehingga tekanan penduduk pada suatu ruang tertentu dapat dikurangi; *Kedua*, pembangunan agribisnis yang pada dasarnya mendayagunakan keragaman hayati, dapat mempertahankan keanekaragaman hayati; *Ketiga*, pembangunan agribisnis yang antara lain mendayagunakan pertumbuhan keragaman tumbuhan, pada dasarnya merupakan "perkebunan karbon" yang efektif dalam mengurangi emisi gas karbon atmosfer yang menjadi salah satu penyebab pemanasan global; *keempat*, pembangunan agribisnis akan menghasilkan produk-produk yang bersifat *biodegradable* yang dapat terurai secara alamiah. Produk agribisnis yang *biodegradable* ini akan dapat mengurangi penggunaan produk-produk petrokimia yang *non-biodegradable*; dan *Kelima*, pembangunan agribisnis yang bergerak dari *factor-driven* ke *capital driven* dan kemudian kepada *innovation-driven* dalam menghasilkan nilai tambah dapat mengurangi tekanan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Perencana pembangunan pertanian telah menguasai strategi penciptaan dan penerapan berbagai jenis teknologi usahatani akrab lingkungan. Berbagai jenis teknologi sistem usahatani akrab



lingkungan telah tersedia dan siap untuk diterapkan di lapangan, yaitu: (a) Sistem usahatani berwawasan konservasi tanah yang meliputi pembuatan teras, pengelolaan bahan organik, tanaman lorong (*alley cropping*), rehabilitasi lahan melalui penutup tanah di mana komoditas pertanian sebagai bagian dari subsistem; (b) Sistem pertanian berkelanjutan dengan masukan rendah (*low input sustainable agriculture*), yaitu melalui efisiensi penggunaan pupuk yang mudah hilang (nitrogen) dan penggunaan pupuk hijau; dan (c) Wanatani (agroforestry), yaitu melalui pengendalian erosi, melestarikan keanekaragaman hayati dan mengkon-servasi c-organik, dan pengembalian unsur-unsur hara secara berimbang.

Dalam usaha penerapan teknologi usahatani ramah lingkungan perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) Teknologi disesuaikan dengan ciri lingkungan, sehingga usahatani tidak bersifat eksploratif, destruktif, dan polutif; (b) Teknologi ditujukan untuk optimasi produksi, dengan mempertimbangkan kemampuan daya dukung lahan, dan keseimbangan ekosistem; dan (c) Teknologi dan sistemn produksi memperhatikan kriteria kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sistem produksi. Dengan demikian teknologi usahatani akrab lingkungan dapat diartikan sebagai usaha pertanian dengan penerapan teknologi yang tepat dan sesuai lingkungan, sehingga diperoleh produksi optimal dan sumberdaya lahan terhindar dari kerusakan fisik dan biologis, pencemaran residu kimia, dan gas rumah-kaca.



### III. MASALAH DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN SISTEM DAN USAHA AGRIBISNIS

#### 3.1. Kelemahan Pembangunan Sistem Agribisnis Masa Lalu

Pembangunan agribisnis di masa lalu, memiliki kelemahan mendasar yang merupakan akar sebagian besar kelemahan agribisnis selama ini. Kelemahan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

**Pertama**, Pembangunan **agribisnis** dimasa lalu lebih terfokus pada pembangunan usahatani (*on-farm agribusiness*) dengan sasaran utama peningkatan produksi. Hampir seluruh program dan pembangunan agribisnis di masa lalu ditujukan untuk pengembangan usahatani. Sedangkan industri hulu agribisnis (*up-stream agribusiness*) yakni industri yang menghasilkan barang-barang modal seperti industri perbenihan/pembibitan, industri agro-kimia, industri agro-otomotif dan industri hilir agribisnis (*down-stream agribusiness*) yakni industri yang mengolah hasil agribisnis dan pemasarannya kurang memperoleh perhatian. Kurang tersedianya barang-barang modal yang diperlukan usahatani, menyebabkan produktifitas usahatani relatif rendah. Akibatnya peningkatan produksi agribisnis diperoleh dengan memperluas areal usahatani atau mengandalkan sumberdaya alam (*factor-driven*), dan bukan dari peningkatan produktivitas. Hal ini menyebabkan produksi agribisnis Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim dan perubahan ekonomi.

Sementara itu, kurangnya perkembangan industri pengolahan yang terkait dengan produksi usahatani mempengaruhi daya serap pasar akan produksi usahatani baik karena produksi usahatani yang tidak sesuai dengan yang diinginkan pasar maupun karena informasi pasar yang tidak ditransmisikan ke usahatani. Akibatnya sering terjadi kelebihan atau kekurangan produksi untuk suatu komoditi pada waktu tertentu. Kurangnya perhatian pada pengembangan industri hilir ini

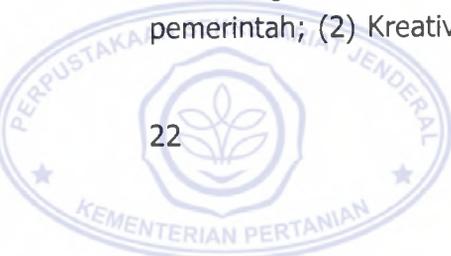


secara keseluruhan juga melemahkan kemampuan penetrasi pasar agribisnis Indonesia. Meskipun Indonesia mampu menjadi salah satu produsen berbagai komoditi terbesar di dunia seperti pada minyak sawit, minyak kelapa, karet alam, kakao dan lain-lain, namun tidak memiliki posisi tawar di pasar internasional. Secara keseluruhan hal-hal di atas menyebabkan daya saing agribisnis Indonesia sangat lemah.

Terkait dengan pembangunan agribisnis yang terfokus pada usahatani, disadari atau tidak juga telah membatasi ruang gerak perkembangan organisasi ekonomi petani. Organisasi petani seperti koperasi petani umumnya hanya bergerak pada usahatani dan sangat kurang berkembang menangani industri hulu dan hilir agribisnis. Hampir seluruh industri pengolahan hasil agribisnis dan industri hulu agribisnis yang ada tidak melibatkan organisasi ekonomi petani. Akibatnya pada pasar input petani menghadapi kekuatan monopolistik sementara pada pasar hasil usahatani menghadapi kekuatan monopsonitis. Struktur seperti ini menyebabkan petani hanya menguasai mata rantai yang bernilai tambah kecil dan berisiko tinggi yakni usahatani (*on-farm*) sehingga pendapatan petani tetap rendah.

**Kedua**, pendekatan pembangunan agribisnis di masa lalu sangat sentralistik dan *top-down*. Proses perencanaan pembangunan agribisnis di masa lalu dilakukan secara terpusat, kurang melibatkan partisipasi rakyat di setiap daerah, diterapkan secara nasional dan lebih menggunakan lembaga pemerintah formal sebagai saluran program pembangunan.

Pendekatan pembangunan secara sentralistik dan *top-down* yang telah berlangsung lama tersebut telah menimbulkan berbagai akibat yang melemahkan pembangunan agribisnis itu sendiri, yakni: (1) Kreativitas rakyat khususnya petani kurang berkembang dan cenderung menumbuhkan sikap ketergantungan pada bantuan pemerintah; (2) Kreativitas dan kearifan lembaga-lembaga lokal (*local*



*wisdom*) tidak berkembang dan bahkan banyak yang telah hilang; (3) Program pembangunan agribisnis menjadi sangat tidak efisien dan efektif karena dengan pendekatan yang demikian memerlukan organisasi dan biaya birokrasi pemerintah yang relatif besar; dan (4) Program pembangunan agribisnis yang dirancang dan diterapkan secara nasional banyak yang tidak sesuai dengan kondisi lokal di setiap daerah, sehingga komoditi/produk yang menjadi keunggulan komparatif setiap daerah tidak berkembang bahkan terdesak oleh komoditi pilihan dari atas.

**Ketiga,** Pembangunan agribisnis di masa lalu kurang didukung oleh kebijakan makro ekonomi yang kondusif. Kebijakan moneter (seperti suku bunga dan kredit) serta fiskal (seperti alokasi anggaran untuk sektor agribisnis) dimasa lalu kurang mendukung sektor agribisnis. Kebijakan perdagangan (*trade policy*) yang merupakan kombinasi tarif impor, atau pajak ekspor dengan nilai tukar rupiah yang *overvalued* cenderung merugikan agribisnis domestik dan menguntungkan sektor non-agribisnis dan impor. Secara umum, tingkat proteksi industri 10 kali lebih tinggi daripada proteksi agribisnis. Akibatnya, nilai tukar barter agribisnis terhadap industri menurun dari tahun ke tahun. Karena nilai tukar barter dapat menjadi salah satu cerminan keuntungan relatif maka penurunan nilai tukar barter tersebut mencerminkan bahwa keuntungan investasi pada agribisnis hanya setengah kali dari keuntungan berinvestasi pada industri. Sehingga investor baru enggan masuk ke agribisnis bahkan investasi justru mengalir ke sektor non-agribisnis, konversi lahan agribisnis mudah terjadi, dan agribisnis mengalami penghisapan modal (*capital-drain*) dan sumberdaya manusia terdidik (*brain-drain*).

Keuntungan relatif agribisnis yang lebih rendah tersebut juga mempengaruhi alokasi kredit perbankan pada agribisnis. Hal ini diperburuk pula oleh sistem perbankan nasional yang bersifat *branch banking system* dimana perencanaan skim perkreditan kurang



mengakomodasikan karakteristik agribisnis/agribisnis daerah. Akibatnya rata-rata alokasi kredit pada agribisnis hanya sekitar 10-20 persen dari total kredit yang disalurkan perbankan. Hal ini memperlambat pembentukan modal agribisnis sehingga memperlambat peningkatan produktivitas. Karena itu untuk mendukung pembangunan agribisnis ke depan, ekonomi yang netral baik antar sektor domestik maupun antar negara sangat diperlukan.

### **3.2. Tantangan Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis**

Menyongsong masa depan, pembangunan agribisnis Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan baik akibat perubahan yang terjadi secara internasional maupun yang bersumber dari dalam negeri.

#### **3.2.1. Perubahan Lingkungan Internasional**

Liberalisasi perdagangan dunia yang sedang dan akan berlangsung merupakan tantangan yang dihadapi pembangunan agribisnis ke depan. Komitmen-komitmen dalam WTO/GATT untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan hasil-hasil agribisnis mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan dayaaingnya, berkesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik. Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan dayaaingnya akan terdesak oleh para pesaingnya. Oleh karena itu, untuk menghadapi liberalisasi perdagangan tersebut bagi Indonesia tidak ada pilihan kecuali mempercepat peningkatan dayaaing. Pengertian dayaaing dapat diterjemahkan dari sisi permintaan (*demand side*) dan dari sisi penawaran (*supply side*).



Dari sisi permintaan, kemampuan bersaing mengandung arti bahwa produk agribisnis yang dijual haruslah produk yang sesuai dengan atribut yang dituntut konsumen atau produk yang dipersepsikan bernilai tinggi oleh konsumen (*consumer's value perception*). Dalam kaitan ini, dewasa ini telah terjadi sejumlah perubahan nilai pada konsumen yang mempengaruhi perilaku dalam membeli suatu produk agribisnis. Perubahan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

**Pertama**, meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya kaitan kesehatan dan kebugaran dengan konsumsi makanan, telah meningkatkan tuntutan konsumen akan kandungan nutrisi dari produk-produk yang sehat (*healty*), aman (*safety*) dan menunjang kebugaran (*fitness*). **Kedua**, Perubahan gaya hidup (*life style*) masyarakat telah merubah pola dan gaya konsumsi produk-produk agribisnis yang bukan sekadar berdimensi fisiologis akan tetapi telah meluas pada dimensi psikologis dan kenikmatan (*amenities*). Perubahan ini menyebabkan meningkatnya tuntutan keragaman produk dan keragaman kepuasan. **Ketiga**, Meningkatnya kesadaran masyarakat internasional akan kaitan antara kelestarian lingkungan hidup dengan kesejahteraan manusia di planet bumi, telah mendorong masuknya aspek kelestarian lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Suatu produk agribisnis yang dalam proses produksinya dan atau konsumsinya menimbulkan kemerosotan mutu lingkungan hidup (air, tanah, udara) akan dinilai sebagai produk yang *inferior*. Sebaliknya, produk yang proses produksinya atau konsumsinya dapat memperbaiki mutu lingkungan hidup akan dinilai sebagai produk yang *superior*, dan **keempat**, meningkatnya kesadaran masyarakat internasional akan hak-hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu nilai bersama (*global value*) yang turut dipertimbangkan dalam keputusan ekonomi. Produk-produk agribisnis yang secara langsung



atau tidak langsung melanggar HAM dalam proses produksinya akan mengalami pemboikotan (*embargo*) di pasar internasional.

Keempat perubahan tersebut di atas telah merubah perilaku konsumen dalam mengevaluasi suatu produk yang akan dibeli. Bila di masa lalu konsumen hanya mengevaluasi suatu produk berdasarkan atribut utama yakni jenis dan harga, maka dewasa ini dan terlebih-lebih di masa yang akan datang, konsumen sudah menuntut atribut yang lebih rinci. Atribut rinci yang dimaksud adalah (1). Atribut keamanan produk (*safety attributes*); (2) Atribut nutrisi (*nutritional attributes*); (3) atribut nilai (*value attributes*); (4) atribut pengepakan (*package attributes*); (5) Atribut lingkungan (*ecolabel attributes*); dan (6) Atribut kemanusiaan (*humanistic attributes*). Atribut-atribut tersebut telah melembaga baik secara internasional (misalnya *sanitary and phytosanitary* pada WTO) maupun secara individual negara (menjadi standar mutu produk agribisnis setiap negara).

Sementara, dari sisi penawaran, kemampuan bersaing berkaitan dengan kemampuan merespons perubahan atribut-atribut produk yang dituntut oleh konsumen secara efisien. Kemampuan merespons ini menyangkut dua hal pokok.

**Pertama**, integrasi vertikal mulai dari hulu sampai ke hilir dari suatu sistem agribisnis komoditas pada suatu alir produk (*product-line*). Atribut suatu produk akhir agribisnis merupakan hasil kumulatif dari semua subsistem agribisnis dari hulu sampai ke hilir. Karena itu, pengelolaan secara integrasi vertikal suatu sistem agribisnis yang menjamin transmisi informasi pasar secara sempurna dan cepat dari hilir ke hulu, meminimumkan margin ganda, dan menjaga konsistensi mutu produk dari hulu ke hilir, akan menentukan ketepatan dan kecepatan merespons perubahan pasar.

**Kedua**, sumber kekuatan sistem dan usaha agribisnis dalam merespons perubahan pasar. Untuk merespons atribut-atribut produk yang dituntut konsumen, sistem agribisnis tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan alam dan sumberdaya manusia tak terdidik (*factor driven*). Perubahan-perubahan pasar hanya dapat direspons dengan kekuatan barang-barang modal dan sumberdaya manusia yang lebih terdidik (*capital driven*) dan mengandalkan ilmu pengetahuan teknologi dan sumberdaya manusia terampil (*innovation driven*).

Hal-hal tersebut merupakan tantangan pembangunan agribisnis dalam menghadapi perubahan pasar yang mendasar dan cepat. Pengelolaan pembangunan agribisnis harus mampu membangun kelengkapan dan keutuhan suatu *product-line* serta menjadikan sumberdaya manusia terampil, barang-barang modal dan inovasi-teknologi sebagai sumber peningkatan produktivitas, nilai tambah dan sekaligus menjadi kekuatan dalam merespons perubahan pasar.

### **3.2.2. Perubahan Lingkungan Domestik**

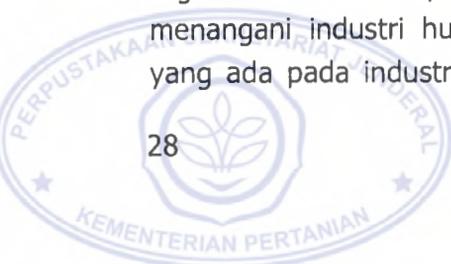
**Pertama**, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia akan terjadi beberapa perubahan penting. Bila sebelumnya peran pemerintah dalam pembangunan agribisnis sangat dominan, saat ini berubah menjadi fasilitator, stimulator atau promotor pembangunan agribisnis. Pembangunan agribisnis pada era otonomi daerah akan lebih mengandalkan kreativitas rakyat di setiap daerah. Selain itu, bila pada masa sebelumnya peranan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan peranan pemerintah daerah, adanya otonomi daerah akan memperbesar peranan pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya akan menangani aspek-aspek pembangunan agribisnis yang tidak efektif atau efisien ditangani pemerintah daerah atau menangani aspek-aspek pembangunan agribisnis yang



menyangkut kepentingan beberapa daerah dan nasional. Selain itu tuntutan jaman menghendaki pergeseran peranan masyarakat yang lebih dominan daripada pemerintah.

Perubahan tersebut membawa implikasi penting bagi pengelolaan pembangunan agribisnis, yaitu: (1) Pembangunan agribisnis akan ditentukan oleh pelaku ekonomi yakni usaha-usaha agribisnis mulai dari usahatani keluarga (petani), usaha kecil-menengah, koperasi dan usaha besar. Karena itu pemerintah baik pusat maupun daerah perlu memfasilitasi berkembangnya usaha-usaha agribisnis khususnya usahatani keluarga, usaha kecil-menengah dan koperasi; (2) pemerintah pusat harus lebih memungkinkan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan agribisnis; dan (3) Kemampuan pemerintah dalam mengorkestra seluruh potensi pembangunan agribisnis perlu lebih ditingkatkan sehingga sinkronisasi program baik jenis, spatial maupun waktu dapat diwujudkan guna menumbuh-kembangkan kreativitas pelaku agribisnis.

**Kedua**, mengingat sampai saat ini kelompok terbesar rakyat adalah para petani yang selama ini kurang memiliki kemampuan ekonomi, maka pembangunan agribisnis ke depan harus memfokuskan upaya pemberdayaan petani dan organisasi ekonominya. Mengingat skala usahatani yang dikuasai para petani umumnya relatif kecil, maka untuk meningkatkan pendapatan petani tidak mungkin lagi dengan mengandalkan lahan yang begitu sempit. Karena itu, bila memungkinkan redistribusi lahan dan mencegah fragmentasi lahan perlu diupayakan. Alternatif lain adalah, sumber peningkatan pendapatan petani perlu dialihkan dari perluasan lahan kepada produktifitas baik dari penggunaan barang-barang modal (*capital-driven*) maupun dari inovasi teknologi (*innovation driven*) Selain itu, organisasi ekonomi petani perlu ditumbuh-kembangkan untuk ikut menangani industri hulu dan hilir agribisnis, sehingga nilai tambah yang ada pada industri hulu dan hilir agribisnis dapat dinikmati oleh



para petani yang secara individu menguasai usahatani. Pengembangan organisasi ekonomi petani yang demikian juga dapat memperkuat *bargaining power* petani baik di pasar input usahatani maupun pada pasar hasil agribisnis.



## IV. VISI, MISI, DAN TUJUAN PEMBANGUNAN SISTEM DAN USAHA AGRIBISNIS

Berdasarkan amanat GBHN 1999-2004, kekuatan dan kelemahan pembangunan di masa lalu, perubahan-perubahan lingkungan global, serta menyadari tantangan ke depan, visi pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang akan dipromosikan secara nasional adalah:

*Terwujudnya perekonomian nasional yang sehat melalui pembangunan agribisnis yang berdayasaing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan desentralistis.*

### 4.1. Pembangunan Sistem Agribisnis

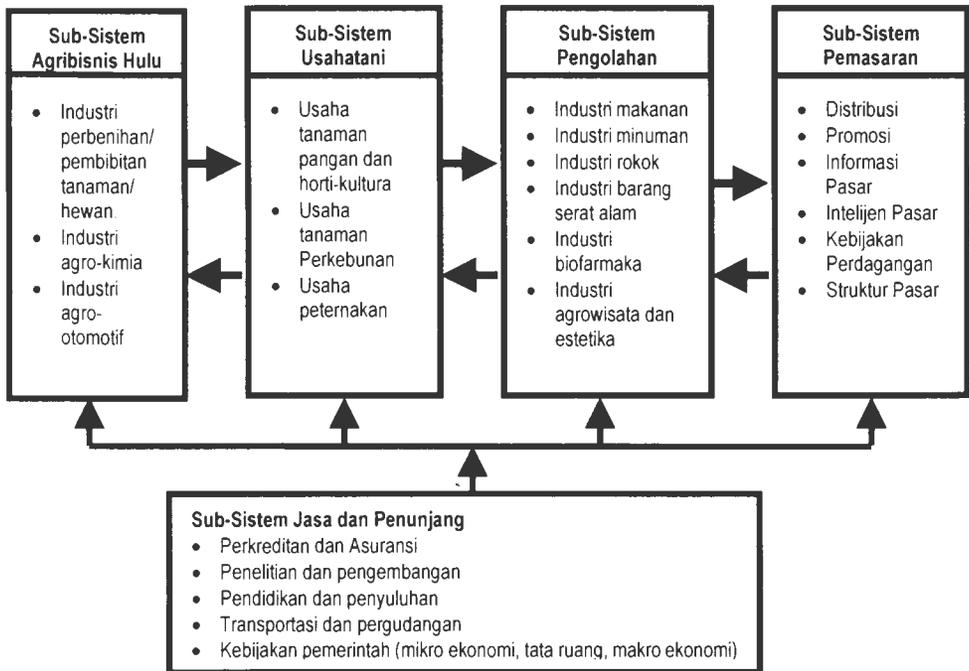
Sistem agribisnis merupakan totalitas atau kesatuan kinerja agribisnis yang terdiri dari subsistem agribisnis hulu yang berupa kegiatan ekonomi input produksi, informasi, dan teknologi; subsistem usahatani, yaitu kegiatan produksi pertanian primer tanaman dan hewan; subsistem agribisnis pengolahan, subsistem pemasaran; dan subsistem penunjang, yaitu dukungan sarana dan prasarana serta lingkungan yang kondusif bagi pengembangan agribisnis. Dengan demikian pembangunan sistem agribisnis mencakup lima subsistem, yakni:

**Pertama :** Subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) yakni industri-industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian (arti luas) yakni industri perbenihan/pembibitan tumbuhan dan hewan, industri agrokimia (pupuk, pestisida, obat/vaksin ternak) dan industri agro-otomotif (mesin dan peralatan pertanian) serta industri pendukungnya.



- Kedua** : Subsistem usahatani (*on-farm agribusiness*) yakni kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumberdaya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer. Termasuk dalam hal ini adalah usahatani tanaman pangan dan hortikultura, usahatani tanaman obat-obatan, usahatani perkebunan, dan usahatani peternakan, usaha perikanan dan usaha kehutanan.
- Ketiga** : Subsistem pengolahan (*down-stream agribusiness*) yakni industri yang mengolah komoditas pertanian primer (agroindustri) menjadi produk olahan baik produk antara (*intermediate product*) maupun produk akhir (*finish product*). Termasuk di dalamnya industri makanan, industri minuman, industri barang-barang serat alam (barang-barang karet, plywood, pulp, kertas, bahan-bahan bangunan terbuat kayu, rayon, benang dari kapas/sutera, barang-barang kulit, tali dan karung goni), industri biofarmaka, dan industri agro wisata dan estetika.
- Keempat** : Subsistem pemasaran yakni kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian baik segar maupun olahan di dalam dan di luar negeri. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan distribusi untuk memperlancar arus komoditi dari sentra produksi ke sentra konsumsi, promosi, informasi pasar, serta intelijen pasar (*market intelligence*).
- Kelima** : Subsistem jasa yang menyediakan jasa bagi sub-sistem agribisnis hulu, sub-sistem usahatani dan sub-sistem agribisnis hilir. Termasuk ke dalam sub-sistem ini adalah penelitian dan pengembangan, perkreditan dan asuransi, transportasi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, sistem informasi dan dukungan kebijakan pemerintah (mikro ekonomi, tata ruang, makro ekonomi).

Secara singkat lingkup pembangunan sistem agribisnis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Lingkup Pembangunan Sistem Agribisnis**

Dalam pembangunan sistem agribisnis, keempat sub-sistem tersebut beserta usaha-usaha di dalamnya harus dikembangkan secara simultan dan harmonis. Karena itu tugas manajemen pembangunan adalah mengorkestra perkembangan kelima sub-sistem tersebut secara harmonis.

Proses pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam kaitan ini, pembangunan sistem dan usaha agribisnis diarahkan untuk mendayagunakan keunggulan komparatif

(*comparative advantage*) Indonesia sebagai menjadi keunggulan bersaing (*competitive advantage*).

## **4.2. Pembangunan Usaha Agribisnis**

Sistem agribisnis tidak akan dapat berkembang tanpa dukungan usaha-usaha agribisnis. Para pengusaha yang merancang, merencanakan dan melakukan proses agribisnis itu sendiri mulai dari proses pemasaran ke proses produksi. Oleh karena itu pemerintah harus mendorong berkembangnya usaha agribisnis. Usaha yang dimaksud dapat berupa usaha rumah-tangga seperti usaha tani keluarga, *home industry*, koperasi, usaha kelompok, usaha kecil, menengah, maupun usaha besar yang bergerak pada subsistem agribisnis, hulu on farm, maupun di hilir. Pengembangan perusahaan agribisnis diterjemahkan sebagai peningkatan kuantitas, kualitas manajemen, dan kemampuan untuk melakukan usaha secara mandiri dan memanfaatkan peluang pasar. Dimasa depan usaha agribisnis akan memainkan peran yang dominan.

## **4.3. Arah Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis**

Sistem dan usaha agribisnis yang dibangun ke depan adalah suatu sistem dan usaha yang tangguh yang memiliki empat karakteristik yaitu (i) berdayasaing, (ii) berkerakyatan, (iii) berkelanjutan, dan (iv) desentralistis.

### **4.3.1. Membangun Sistem dan Usaha Agribisnis yang Berdayasaing**

Dayasaing dicirikan oleh tingkat efisiensi, mutu, harga dan biaya produksi, serta kemampuan untuk menerobos pasar, meningkatkan pangsa pasar, dan memberikan pelayanan yang profesional.



Membangun sistem dan usaha yang berdayasaing dipengaruhi oleh dua faktor strategis yaitu (i) sisi permintaan, dan (ii) sisi penawaran. Dari sisi permintaan, terbuka peluang-peluang pasar yang cukup besar akibat globalisasi. Peluang-peluang yang muncul akibat keterbukaan pasar harus dapat diterjemahkan dalam pengembangan agribisnis yang dihela oleh pasar (*market driving*). Pasar berubah sangat cepat, menuntut produk-produk yang mengarah ke produk olahan dan bermutu, sehingga menghendaki pengembangan produk (*product development*) yang cepat pula. Perubahan pasar yang demikian cepat, baik di pasar ekspor maupun pasar domestik harus eksplorasi dengan baik agar produsen dapat menyesuaikan produk-produknya dengan selera pasar. Paradigma orientasi produksi yang ditempuh sejak dulu harus segera digeser ke orientasi pasar untuk memproduksi produk yang diinginkan oleh pasar (dari *market what you can produce* ke *produce what you can market*).

Dari sisi penawaran, pengusaha agribisnis harus mampu memproduksi produk-produk agribisnis yang mampu bersaing. Siklus produk *Product life cycle* yang semakin pendek memerlukan pengembangan produk yang berarti membutuhkan teknologi. Untuk itu pengusaha-pengusaha agribisnis harus proaktif dalam memanfaatkan inovasi dan teknologi sebagai sumber dayasaing. Selain itu produk-produk bermutu juga harus diiringi dengan harga yang bersaing, kontinuitas produk, promosi yang proaktif, serta pengembangan jaringan distribusi pemasaran, agar terdapat mobilitas yang tinggi dari produk-produk agribisnis di pedesaan ke daerah-daerah konsumsi.

Untuk membangun sistem dan usaha agribisnis yang mampu bersaing, harus ada kebijakan-kebijakan terobosan agar sistem agribisnis kita yang kini mengandalkan kelimpahan sumberdaya alam dan tenaga kerja yang tidak terdidik (*factor driven*) secepatnya ditranformasi ke suatu sistem yang digerakkan oleh kekuatan modal



(*capital-driven*) melalui percepatan pembangunan dan pendalaman industri pengolahan dan industri hulu.

Proses transformasi selanjutnya adalah pembangunan sistem agribisnis yang digerakkan oleh kekuatan inovasi (*innovation-driven*) melalui peningkatan kemajuan teknologi pada setiap subsistem agribisnis pada setiap kelompok agribisnis; disertai dengan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, sehingga tetap sinkron dengan perkembangan teknologi yang ada.

Dalam upaya menciptakan usaha-usaha agribisnis yang berdayasaing, harus dilakukan kebijakan untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha mandiri yang tidak menggantungkan diri kepada pemerintah. Pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan melakukan pelatihan manajemen untuk menumbuhkembangkan usaha-usaha agribisnis yang tangguh.

Melalui proses transformasi bertahap tersebut, kandungan modal, teknologi, inovasi dan mutu sumberdaya manusia akan merupakan ciri sistem agribisnis ke depan dan mampu bersaing di pasar global.

#### **4.3.2. Membangun Sistem dan Usaha Agribisnis Berkerakyatan**

Sistem yang berkerakyatan dicirikan oleh berkembangnya usaha produktif yang melibatkan masyarakat secara luas baik dalam peluang berusaha, kesempatan kerja, maupun dalam menikmati nilai tambah (pendapatan). Hal ini tidak berarti harus hanya memperhatikan usaha skala kecil dan menengah, tetapi juga usaha skala besar dalam konsep kerjasama (kemitraan yang *Win-Win Innelition*) dengan usaha kecil dan menengah, dan yang mempunyai dampak multiplier yang besar.

Peranan pemerintah baik di Pusat maupun di daerah akan diarahkan untuk memberdayakan dan memfasilitasi tumbuh-kembangnya kreatifitas masyarakat luas di seluruh daerah.

Dalam mewujudkan suatu sistem agribisnis yang berkerakyatan, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan organisasi ekonomi seperti usaha rumah tangga, koperasi/kelompok, usaha kecil, usaha menengah beserta jaringan usahanya (*network business*) menjadi perhatian utama yang perlu dipromosikan pemerintah. Di masa lalu, para petani yang merupakan kelompok terbesar dari rakyat Indonesia, terbatas hanya mengusahai dan menguasai mata rantai yang memberikan nilai tambah terkecil yakni sub-sistem usahatani. Mata rantai agribisnis yang memberikan nilai tambah terbesar yakni subsistem agribisnis hulu dan hilir tidak pernah mengikutsertakan petani. Akibatnya para petani kita tetap berpendapatan rendah dan usahatannya dengan mudah dipermainkan oleh kekuatan monopolistik dan monopsonistik yang ada pada sub-sistem agribisnis hulu dan hilir. Oleh karena itu, di masa mendatang pemerintah perlu memberdayakan, mendorong dan memfasilitasi tumbuh-kembangnya kreatifitas rakyat di seluruh daerah untuk mengembangkan organisasi ekonominya beserta jaringan usahanya untuk ikut serta menangani kegiatan ekonomi pada subsistem agribisnis hulu maupun hilir. Salah satu cara adalah memberikan kesempatan (misalnya memberikan skim perkreditan) kepada UKM dan koperasi untuk membeli saham BUMN agribisnis yang sedang atau akan *go public*.

Dalam upaya membangun sistem agribisnis berkerakyatan, tetap diperlukan partisipasi usaha swasta asing (PMA). Partisipasi usaha swasta pada pembangunan sistem agribisnis ditempatkan dalam kerangka memperkuat organisasi ekonomi rakyat dan bukan menggantikan atau menyingkirkan organisasi ekonomi rakyat banyak. Oleh karena itu bentuk-bentuk *joint operation* atau *joint venture* antara UKM dan Koperasi dengan PMA pada sistem agribisnis perlu dikembangkan.



### 4.3.3. Membangun Sistem dan Usaha Agribisnis Yang Berkelanjutan

Berkelanjutan diartikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya agribisnis yang semakin besar dari waktu ke waktu, yang semakin menyejahterakan masyarakat, baik secara ekonomis, sosial, dan lingkungan hidup. Karena dalam sistem dan usaha agribisnis terdapat keterkaitan yang sangat kuat antara kepentingan para pelakunya termasuk antara lain konsumen, maka distribusi insentif ekonomi dan manfaat ekonomi di antara pelaku agribisnis merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sistem dan usaha agribisnis.

Membangun sistem dan usaha agribisnis yang berkelanjutan, memiliki dimensi yang luas baik secara organisasi, kelembagaan, ekonomi, teknologi dan ekologis. Organisasi dan kelembagaan baik dalam bidang ekonomi, maupun dalam pengelolaan pembangunan harus dikembangkan dengan melakukan hibridisasi organisasi dan kelembagaan tradisional-lokal dengan organisasi dan kelembagaan modern, sehingga akan terbangun suatu sistem yang berakar kokoh dalam budaya bangsa namun akomodatif terhadap perkembangan jaman.

Ekonomi yang dibangun melalui pembangunan sistem dan usaha agribisnis adalah sistem ekonomi yang berakar kokoh pada keragaman sumberdaya yang kita miliki di setiap daerah, dengan pelaku ekonomi yang tidak hanya melihat kepentingan jangka pendek (*myopic*) melainkan melihat kepentingan jangka panjang. Untuk itu insentif dalam pengembangan inovasi-teknologi harus terus menerus dilakukan untuk mencapai menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pengembangan teknologi dalam sistem agribisnis mulai dari hulu sampai ke hilir perlu diarahkan kepada teknologi yang ramah lingkungan (*green industry*) dalam kerangka mewujudkan suatu industri yang bersahabat dengan lingkungan. Dengan demikian



**Tabel 5. Matrik Indikator dan Upaya Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis**

Atribut	Sistem Agribisnis		Usaha Agribisnis	
	Indikator	Upaya	Indikator	Upaya
<b>Berdaya-saing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berubahnya sumber pertumbuhan agribisnis dari produksi ke produktivitas dan nilai tambah yang disebabkan oleh pemanfaatan teknologi, modal dan mutu SDM</li> <li>Meningkatnya pangsa pasar produk agribisnis Indonesia di pasar global</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan semua subsistem agribisnis secara harmonis</li> <li>Percepatan pengembangan dan diseminasi teknologi</li> <li>Percepatan pengembangan mutu SDM</li> <li>Membangun kelembagaan usaha yang mengintegrasikan/mengkordinasikan semua subsistem</li> <li>Pengembangan infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya efisiensi usaha</li> <li>Meningkatnya mutu produk sesuai dengan permintaan pasar</li> <li>Kemampuan merespons dinamika pasar secara efisien</li> <li>Meningkatnya pangsa pasar</li> <li>Harga yang bersaing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Diklat untuk meningkatkan mutu SDM dan penguasaan teknologi</li> <li>Meningkatkan promosi dan akses pasar</li> <li>Meningkatkan promosi dan akses pasar</li> <li>Pengembangan pusat-pusat informasi agribisnis</li> </ul>



keseluruhan kegiatan ekonomi yang dikembangkan akan menuju suatu perekonomian yang mengakomodir pelestarian lingkungan (*green economy*).

#### **4.3.4. Membangun Sistem dan Usaha Agribisnis Yang Desentralistis**

Desentralistis diartikan bahwa kegiatan ekonomi ditentukan oleh masyarakat pelaku sesuai dengan kondisi wilayahnya atas dasar keunggulan komparatif dan aspirasi masyarakat setempat. Oleh karena itu sistem pelayanan pemerintah, sistem penunjang dan pemberdayaan masyarakat akan bersifat lokal, beragam dan harus dilakukan oleh daerah setempat. Dengan demikian, secara alamiah pembangunan sistem agribisnis pada hakekatnya merupakan pembangunan ekonomi daerah. Hal ini sesuai dengan esensi otonomi daerah yakni melakukan desentralisasi dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam kerangka pemberdayaan organisasi ekonomi masyarakat luas sebagai pelaku utama sistem agribisnis, pembagian tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) perlu dilakukan. Pemerintah pusat akan difokuskan pada empat hal pokok yakni: (1) Memberdayakan Dinas-Dinas daerah agar mampu mengelola pembangunan sistem dan usaha agribisnis di daerah masing-masing; (2) Meng-orkestra pembangunan sistem agribisnis antar daerah (propinsi) agar dapat berjalan secara sinergis dan harmonis; (3) Menangani aspek-aspek pembangunan sistem agribisnis yang menyangkut kepentingan beberapa daerah dan atau menangani aspek-aspek pembangunan sistem agribisnis yang tidak efisien dan efektif diserahkan pembangunannya pada satu daerah (propinsi) dan (4) Menangani dan mengkoordinasikan kebijakan ekonomi sektoral, antar sektor, makro ekonomi dan perdagangan/kerjasama internasional.

Matriks berikut memperlihatkan kaitan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dimaksud.



<p><b>Berkerak- yatan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkembangnya sistem agribisnis yang menggunakan sumberdaya yang dimiliki/dikuasai rakyat banyak</li> <li>• Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi rakyat banyak</li> <li>• Meningkatnya bagian nilai tambah yang tercipta dalam sistem agribisnis yang diterima oleh rakyat banyak</li> <li>• Meningkatnya penguasaan asset produktif (terutama lahan) oleh rakyat banyak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan aksesibilitas organisasi ekonomi rakyat banyak pada sumber-sumber permodalan, teknologi dan pasar</li> <li>• Membuat kebijakan yang merangsang partisipasi rakyat banyak dalam melakukan kegiatan agribisnis</li> <li>• Mengupayakan reformasi agraria untuk meningkatkan akses rakyat banyak terhadap asset produktif baik lahan, maupun barang-barang modal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkembangnya usaha rumah tangga, kelompok, UKM dan Koperasi pada setiap sub-sistem agribisnis</li> <li>• Meningkatnya pendapatan usaha yang dilakukan oleh organisasi ekonomi rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi berkembangnya organisasi ekonomi rakyat, khususnya pada sub-sistem hulu dan hilir</li> <li>• Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM dan penguasaan teknologi yang melibatkan rakyat banyak</li> <li>• Bantuan permodalan secara selektif dan mendidik</li> </ul>
-----------------------------------	--	---	---	--

<p><b>Berkelanjutan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kapasitas sumberdaya serta kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan</li> <li>• Distribusi profit margin yang adil antar sub-sistem agribisnis</li> <li>• Tersedianya lebih banyak teknologi produksi ramah lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sistem insentif untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan</li> <li>• Pengembangan kelembagaan pemasaran yang transparan</li> <li>• Meningkatkan promosi dan akses pasar</li> <li>• Mengembangkan kapasitas lembaga-lembaga penelitian yang menghasilkan teknologi</li> <li>• Mengembangkan lembaga-lembaga pelatihan SDM</li> <li>• Memantapkan kepastian tata ruang wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha agribisnis terus berkembang dengan peningkatan volume dan nilai tambah</li> <li>• Terjadinya inovasi teknologi secara terus menerus sebagai sumber pertumbuhan usaha</li> <li>• Meningkatnya kualitas manajemen usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan insentif yang dapat mendorong perusahaan melakukan pengembangan inovasi teknologi secara terus menerus</li> <li>• Memfasilitasi berkembangnya struktur pasar yang transparan dan berkeadilan</li> <li>• Membuat kebijakan yang dapat memberikan jaminan kepastian berusaha</li> </ul>
-----------------------------	--	---	---	--

<p><b>Terdesentralisasi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkembangnya sentra-sentra pertumbuhan agribisnis di daerah yang berbasis sumberdaya lokal</li> <li>• Berkembangnya perekonomian pedesaan</li> <li>• Meningkatnya kontribusi sektor agribisnis terhadap PDRB</li> <li>• Meningkatnya kemampuan PEMDA untuk mengelola pembangunan sistem dan usaha agribisnis</li> <li>• Tumbuhkembangnya berbagai kelembagaan ekonomi lokal</li> <li>• Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur di daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempercepat aktualisasi pelaksanaan UU No.22 Th 1999 dan PP No.25 Th 2000</li> <li>• Perencanaan <i>bottom-up</i> melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan <i>stakeholders</i> daerah</li> <li>• Pemberdayaan pemerintah daerah</li> <li>• Memberdayakan kemampuan pelaku agribisnis di daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tumbuhnya kembangnya pengusaha lokal</li> <li>• Tumbuh kembangnya produk-produk agribisnis unggulan daerah</li> <li>• Meningkatnya alokasi kredit perbankan ke daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan kebijakan daerah untuk merangsang investasi usaha agribisnis</li> <li>• Promosi peluang investasi dan produk agribisnis daerah</li> <li>• Mengembangkan lembaga keuangan pedesaan</li> <li>• Mengupayakan perubahan sistem perbankan dari <i>branch banking system</i> menjadi <i>unit banking system</i></li> </ul>
---------------------------------	---	--	---	--



#### 4.4. Misi Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan perekonomian nasional yang sehat melalui proses transformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif, dirumuskan misi berikut:

1. Mengembangkan infrastruktur pembangunan sistem agribisnis (irigasi, *farm road*, pelabuhan, transportasi dan telekomunikasi) yang diperlukan di setiap daerah.
2. Mendorong pengembangan subsistem agribisnis hulu (agrootomotif, agrokimia, benih/bibit).
3. Menumbuhkembangkan subsistem budidaya yang tangguh.
4. Mendorong pengembangan subsistem pengolahan (agro-industri).
5. Mendorong perbaikan subsistem pemasaran.
6. Mengembangkan inovasi teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan baik pada industri hulu, usaha tani, maupun hilir.
7. Mempercepat proses transformasi sistem agribisnis dari *factor driven* ke *capital driven*, ke *innovation driven*.
8. Menumbuhkembangkan usaha-usaha agribisnis (usaha rumah tangga, kelompok UKM, maupun besar) yang berdayasaing dan berkelanjutan di setiap daerah-daerah.
9. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik aparat pemerintah, maupun pelaku agribisnis.
10. Menciptakan iklim dan kepastian berusaha agribisnis.

#### **4.5. Tujuan Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis**

1. Mengembangkan perekonomian nasional yang berdayasaing, berkelanjutan, berkerakyatan dan terdesentralisasi yang berbasis pada keunggulan komparatif Indonesia sebagai negara agraris dan maritim.
2. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kesempatan kerja serta kesempatan berusaha secara adil melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis.
3. Menciptakan pembangunan ekonomi sebagai dasar yang kokoh untuk pembangunan yang berkelanjutan.
4. Mendorong transformasi struktural secara seimbang melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis.
5. Pengembangan pembangunan ekonomi pedesaan melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdayasaing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisir.
6. Mewujudkan sistem ketahanan pangan nasional yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal.



## V. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SISTEM DAN USAHA AGRIBISNIS

Dalam rangka melaksanakan misi pembangunan sistem dan usaha agribisnis sebagaimana diutarakan pada bab terdahulu, maka beberapa kebijakan berikut ini perlu dilakukan.

### 5.1. Kebijakan Makro

Kebijakan makro yang dimaksudkan di sini adalah upaya menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Kebijakan dilakukan dengan melakukan melalui instrumen makro ekonomi, baik moneter maupun fiskal.

#### 5.1.1. Kebijakan Moneter

Instrumen moneter seperti suku bunga, uang beredar dan nilai tukar dapat dijadikan alat kebijakan dalam merangsang berkembangnya sistem dan usaha agribisnis. Dengan menetapkan suku bunga yang relatif rendah serta perlakuan kredit khusus bagi investasi dan atau modal kerja unit usaha yang bergerak dalam bidang agribisnis, maka pertumbuhan unit usaha sektor agribisnis diharapkan makin cepat.

Hal lain yang perlu memperoleh perhatian dalam kebijakan suku bunga dan perkreditan adalah tercapainya keseimbangan alokasi kredit pada sub-sistem agribisnis hulu, subsistem *on-farm* dan sub-sistem agribisnis hilir sedemikian rupa, sehingga ketiga subsistem tersebut berkembang secara seimbang. Harus dirancang kebijakan moneter untuk memudahkan tersedianya modal bagi usaha-usaha agribisnis.



### 5.1.2. Kebijakan Fiskal

Dua instrumen penting kebijakan fiskal yang dapat dilakukan pemerintah adalah alokasi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dan perlakuan pajak. Kebijakan penerapan pajak dalam rangka perolehan dana pembangunan harus dilakukan secara bijak agar mampu merangsang dunia usaha yang bergerak dalam sektor agribisnis. Demikian pula pembelanjaan anggaran pembangunan (investasi pemerintah) harus memberikan bobot yang lebih besar terhadap pembangunan sektor riil yang terkait langsung dengan pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

Selain investasi pemerintah, masih ada investasi lain yang dapat berpengaruh terhadap sistem dan usaha agribisnis. Investasi yang dimaksud mencakup investasi swasta domestik (PMDN) dan investasi swasta asing (PMA). Investasi PMA dan PMDN memang tidak dapat sepenuhnya diatur oleh pemerintah karena tergantung pengusaha itu sendiri. Namun pemerintah dapat mempengaruhi keputusan investasi swasta melalui pengalokasian investasi pemerintah pada agribisnis dan bentuk-bentuk promosi yang lain.

Alokasi investasi pemerintah perlu memperhatikan tahap-tahap pembangunan sistem agribisnis. Bila pada suatu daerah misalnya Kawasan Timur Indonesia dimana tahap perkembangan sistem dan usaha agribisnis masih berada pada tahap awal (*natural resources and unskill-labor based*), investasi pemerintah perlu difokuskan pada investasi infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, irigasi, dll dan pada investasi pembinaan kelembagaan lokal dan penyuluhan. Alokasi anggaran pemerintah untuk membangun infrastruktur publik tersebut di daerah akan merangsang masuknya investasi swasta termasuk PMA.



Pada daerah dimana tahap perkembangan agribisnisnya sudah memasuki tahap kedua (*capital and skill labor based*), investasi pemerintah perlu diprioritaskan pada pengembangan teknologi sehingga menjadi sumber pertumbuhan baru bagi agribisnis di daerah tersebut untuk memasuki tahap pembangunan sistem agribisnis yang digerakkan oleh investasi/teknologi.

Selain itu diperlukan kebijakan untuk merangsang investasi swasta (PMA, PMDN) dalam bidang sistem dan usaha agribisnis, sehingga aliran PMA ke Indonesia benar-benar mendukung pembangunan khususnya pembangunan agribisnis. Kebijakan promosi masuknya modal asing ke Indonesia yang hanya sekedar masuk tanpa memperdulikan sektor ekonomi mana dimasuki sebagaimana populer di masa lalu, hendaknya jangan diulangi lagi karena terbukti merugikan Indonesia sendiri.

Dalam mendukung pembangunan sistem dan usaha agribisnis, kebijakan perpajakan perlu diarahkan untuk mempercepat transformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Karena itu, kebijakan perpajakan juga perlu memperhatikan karakteristik dan tahap-tahap pembangunan sistem agribisnis. Pembebasan pajak atau keringanan pajak sejak dimulai investasi sampai mencapai titik impas (*gestation periode*) bagi perusahaan yang mengembangkan industri hilir dan industri hulu agribisnis, juga dapat menjadi insentif bagi perusahaan untuk mengembangkan agribisnis.

Kemudian untuk mempercepat pengembangan teknologi agribisnis dan peningkatan sumberdaya manusia, perlu kebijakan pajak yang kondusif. Perusahaan agribisnis yang mengalokasikan sebagian keuntungan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi (R & D) dan peningkatan kemampuan (SDM) perlu diberikan keringanan pajak atau diperhitungkan sebagai biaya (keuntungan yang tidak dikenakan pajak). Dengan kebijakan pajak yang demikian



diharapkan perusahaan agribisnis akan terangsang untuk memperkuat R & D dan *Human Resources Development* (HRD).

## 5.2. Kebijakan Pengembangan Industri

Kebijakan pembangunan sektor industri seyogyanya lebih ditujukan untuk menjadikan sektor industri sebagai tulang punggung kegiatan sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis, khususnya untuk memperkuat bagian hulu dan hilir dari sistem agribisnis. Dalam kaitan ini, pembangunan sektor industri harus lebih diarahkan untuk pengembangan agro-industri yang menunjang pengembangan komoditas pertanian andalan utama sebagian besar petani dan mampu memenuhi standar mutu permintaan pasar. Kebijakan untuk memfokuskan pilihan pembangunan sektor industri terhadap agro-industri merupakan kebijakan mendasar yang membutuhkan kearifan dari para penentu kebijakan demi sinkronisasi pembangunan secara nasional.

Untuk mentransformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing, pembangunan sistem agribisnis ke depan (disamping mengembangkan berbagai komoditas yang memiliki keunggulan komparatif) perlu didorong untuk mempercepat pendalaman (*deepening*) struktur industri baik ke hilir (*down-stream*) maupun ke hulu (*up-stream*). Karakteristik khusus produk pertanian primer yang berbeda dari produk non-pertanian adalah sifatnya yang mudah rusak (*perishable*), beragam kualitas dan kuantitas (*variability*), *bulky*, dengan resiko fluktuasi harga yang cukup tinggi. Untuk meningkatkan daya saing produk-produk pertanian dengan sifat-sifat diatas, diperlukan pengembangan industri hilir maupun hulunya. Lebih jauh lagi, pendalaman struktur industri agribisnis dimaksudkan untuk memperkuat daya saing. Jika hanya mengandalkan komoditas pertanian primer, Indonesia akan cenderung senantiasa berperan sebagai penerima harga (*price taker*) dalam pasar internasional.



Pendalaman struktur industri agribisnis ke hilir dilakukan dengan mengembangkan industri-industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan baik produk antara (*intermediate product*), produk semi-akhir (*semi-finished product*) dan terutama produk akhir (*final product*). Agribisnis berbasis minyak sawit perlu dilakukan pendalaman industri ke hilir dengan mengembangkan berbagai jenis industri oleo-pangan (*food-oleo*) dan berbagai jenis industri oleo-kimia. Agribisnis berbasis karet alam perlu dilakukan pendalaman industri hilir dengan mengembangkan industri pengolahan karet lanjutan seperti industri ban otomotif dan industri barang-barang dari karet.

Pada agribisnis tanaman obat-obatan pendalaman struktur industri hilir perlu dilakukan dengan mengembangkan industri farmasi baik untuk kebutuhan manusia, maupun kebutuhan hewan dan tumbuhan.

Pendalaman struktur industri hilir pada agribisnis berbasis perikanan laut dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan ikan dan hasil laut lainnya. Demikian juga agribisnis yang potensial lainnya seperti agribisnis hortikultura (buah, sayuran, bunga), agribisnis berbasis tanaman pangan, agribisnis berbasis peternakan, agribisnis berbasis kayu hutan; dan lain-lain, perlu dipercepat pendalaman struktur industri hilirnya.

Pendalaman struktur industri ke hulu dilakukan dengan mempercepat pengembangan industri pembibitan/pembenihan seluruh komoditas agribisnis potensial Indonesia, pengembangan industri-agro-otomotif yang menghasilkan mesin dan peralatan yang diperlukan baik pada sub-sistem *on-farm* agribisnis, maupun pada sub-sistem agribisnis hilir (industri pengolahan), serta pengembangan industri agro-kimia seperti industri pupuk, industri pestisida dan industri obat-obatan/vaksin hewan.



Pengembangan industri pembenihan/pembibitan ini sangat mendesak sebagai sumber pertumbuhan produktivitas usaha tani. Saat ini industri pembenihan/pembibitan merupakan salah satu mata rantai sistem agribisnis yang lemah. Dalam pada itu dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia merupakan modal dasar yang dapat didayagunakan untuk membangun suatu industri pembenihan/pembibitan di Indonesia.

Pengembangan industri agro-otomotif dapat dikembangkan dengan melakukan penajaman (*focusing*) dari industri mesin dan logam dasar yang sudah ada, sehingga kebutuhan mesin dan peralatan yang diperlukan agribisnis dapat dipenuhi. Demikian pula pengembangan industri agro-kimia, industri kimia dasar yang telah ada dapat difokuskan pada agro-kimia. Pengembangan *bio-fertilizer* dan *bio-pesticide* sudah berkembang dan perlu mendapat dukungan dari pihak terkait.

### **5.3. Kebijakan Perdagangan/Pemasaran dan Kerjasama Internasional**

Perdagangan/pemasaran komoditas agribisnis biasanya sudah merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan industri pengolahan (agro-industri). Tetapi ada kecenderungan pandangan yang demikian menjadikan kegiatan perdagangan/pemasaran hanya merupakan bagian lanjutan kegiatan setelah produk dihasilkan. Padahal kegiatan perdagangan/pemasaran memiliki banyak fungsi selain fungsi menjual barang. Fungsi informasi mengenai spesifikasi dan jumlah produk yang diminta konsumen, harga dan kecenderungan perubahan jenis serta selera konsumen merupakan beberapa contoh fungsi pemasaran yang informasinya dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis. Mengingat hingga saat ini masih banyak dijumpai adanya berbagai kelemahan dan distorsi dalam perdagangan/pemasaran di dalam negeri, maka diperlukan berbagai kebijakan yang dapat



mengefektifkan fungsi-fungsi perdagangan/pemasaran untuk memperlancar arus barang dan jasa. Mekanisme transparansi pembentukan harga (*price discovery*) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran. Bentuk-bentuk pasar seperti bursa komoditi dan pasar lelang merupakan bentuk pasar yang perlu dikembangkan. Sudah tentu peningkatan kemampuan nilai tukar petani harus menjadi prioritas perhatian dalam kebijakan perdagangan ini.

Posisi Indonesia dalam perdagangan global haruslah tetap ditempatkan dalam kerangka pembangunan ekonomi Indonesia. Instrumen-instrumen perdagangan seperti bea masuk dan pajak ekspor harus dirancang dalam kerangka memperkuat struktur industri termasuk agroindustri dan merangsang tumbuhnya usaha-usaha agribisnis nasional. Harus ada kebijakan tarif untuk memberikan perlindungan yang wajar bagi produk-produk agribisnis lokal. Dalam konteks kerjasama seperti AFTA, APEC kepentingan ekonomi nasional harus menjadi fokus yang perlu diposisikan.

Untuk mendukung pengembangan agribisnis, kantor-kantor perwakilan Indonesia di negara-negara lain (kantor duta besar dan konsulat) perlu didayagunakan untuk mendukung pembangunan agribisnis di Indonesia selain kepentingan politik luar negeri. Kantor-kantor perwakilan tersebut harus menjadi pusat promosi produk-produk agribisnis Indonesia di negara tersebut. Dengan demikian, kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri dapat berfungsi sebagai *entry point* usaha-usaha agribisnis Indonesia untuk memasuki pasar negara lain. Selain itu, kantor perwakilan kita perlu secara proaktif "*market intelligence*" diantaranya melakukan kegiatan pemantauan peluang-peluang pasar produk agribisnis yang berprospek dan perusahaan-perusahaan yang dapat diajak menjadi partner pengusaha agribisnis Indonesia.



Selain kebijakan domestik, kebijakan negara lain yang mengekspor produk agribisnisnya ke Indonesia perlu diperhatikan dalam manajemen perdagangan internasional. Produk-produk agribisnis yang menerapkan *dumping*, sehingga seakan-akan kompetitif di Indonesia perlu memperoleh perhatian. Oleh karena itu undang-undang atau peraturan anti-dumping di Indonesia perlu dibuat sesegera mungkin.

#### **5.4. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur**

Keberadaan infrastruktur tidak hanya dibutuhkan untuk mendukung usaha agribisnis yang sudah ada, tapi juga merangsang tumbuhnya usaha-usaha baru yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Pengembangan infrastruktur sebagai bagian dari pelayanan publik akan lebih efektif apabila: (a) sesuai dengan kebutuhan/kepentingan publik, (b) mampu menunjang pengembangan usaha yang dilakukan masyarakat banyak, dan (c) mampu merangsang tumbuhnya usaha-usaha atau investasi baru yang dapat memacu perkembangan ekonomi wilayah. Dalam kaitannya dengan pembangunan sistem dan usaha agribisnis, maka kebijakan pembangunan infrastruktur perlu diarahkan pada infrastruktur yang dibutuhkan oleh banyak pelaku agribisnis dan mampu merangsang para investor untuk melakukan usaha agribisnis. Infrastruktur seperti sarana pengairan dan drainase, jalan, listrik, *farm road*, pelabuhan (khususnya pelabuhan-pelabuhan ekspor baru di wilayah timur Indonesia), transportasi dan telekomunikasi merupakan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

#### **5.5. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan**

Dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis, hal yang perlu dikembangkan bukan sekedar unit-unit usaha fisik yang tidak



berkelanjutan, tetapi unit-unit usaha yang mampu berkembang karena memang dibutuhkan sebagai bagian dari keberlangsungan sistem dan usaha agribisnis. Dengan kata lain, berbagai fungsi atau usaha yang bersifat melembaga perlu diupayakan melalui berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dimaksud antara lain:

### **5.5.1. Pengembangan Lembaga Keuangan**

Kebutuhan permodalan dalam sistem dan usaha agribisnis akan selalu berlangsung sesuai perkembangan usaha. Kebijakan penyediaan modal (*credit program*) yang sifatnya langsung berupa bantuan modal saja dapat menyebabkan ketergantungan para pelaku agribisnis terhadap uluran tangan pemerintah. Oleh karena itu fokus kebijakan mendatang perlu lebih ditujukan untuk pengembangan lembaga keuangan untuk menjadi sumber permodalan bagi usaha-usaha agribisnis. Khusus bagi petani sebagai pelaku agribisnis perlu diupayakan penyediaan kredit dengan prosedur sederhana, suku bunga kondusif serta sistem agunan yang dapat dipenuhi petani.

Untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis, perbankan perlu mengembangkan skim-skim perkreditan (jenis, besaran dan persyaratan) yang sesuai dengan kebutuhan agribisnis dalam arti sesuai dengan tahap-tahap perkembangan agribisnis. Oleh karena itu diperlukan kebijakan untuk mengarahkan, sistem perbankan ke daerah dengan mengembangkan *unit banking system* sebagai pengganti *branch-banking system* yang ada saat ini.

Kegiatan usaha yang dilakukan penduduk Indonesia saat ini masih banyak yang tergolong sebagai usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dimana umumnya usaha-usaha tersebut belum sepenuhnya dapat terlayani oleh lembaga perbankan (bank umum). Oleh karena itu lembaga keuangan yang ideal untuk dikembangkan dalam mengatasi masalah tersebut adalah lembaga keuangan mikro



(LKM) dipedesaan yang tentu saja harus didukung dengan kebijakan dan strategi pengembangan LKM yang komprehensif.

Jenis-jenis LKM pedesaan yang dapat dikembangkan dan atau ditumbuhkan kembali (karena sebelumnya sudah ada) antara lain BPR-BKD (Badan Kredit Desa; BPR-Non BKD seperti Bank Desa, Bank Pasar dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP). Lembaga-lembaga keuangan yang sudah ada di daerah seperti lumbung pitih nagari, Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Lembaga Kredit Pedesaan (LKP), Lembaga Kredit Kecamatan (LKK), Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam perlu dipertahankan dan dimodernisasi.

### **5.5.2. Pengembangan Fungsi Penelitian Dan Pengembangan**

Dengan bergesernya peranan pemerintah dalam proses pembangunan di masa mendatang, fungsi pemerintah dalam menghasilkan teknologi dan berbagai model kelembagaan sistem agribisnis akan semakin strategis dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Saat ini memang fungsi penelitian tersebut didominasi oleh lembaga-lembaga penelitian pemerintah. Namun di masa depan, dengan terbatasnya sumberdaya penelitian yang dimiliki pemerintah, keterlibatan penelitian oleh pihak swasta, organisasi profesi, LSM dan organisasi petani sangat dibutuhkan. Oleh karena itu diperlukan berbagai kebijakan yang dapat merangsang keterlibatan pihak non-pemerintah dalam melakukan penelitian dan pengembangan yang menunjang pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Khusus untuk teknologi yang ditujukan untuk diadopsi oleh petani, maka proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian partisipatif harus dijadikan strategi dalam menghasilkan teknologi yang sesuai kebutuhan petani.

Pendalaman struktur industri agribisnis harus didukung oleh kebijakan pengembangan teknologi. Untuk mendukung pendalaman struktur industri agribisnis, pengembangan bioteknologi perlu dijadikan salah satu alternatif. Bioteknologi sangat luas penerapannya dalam pembangunan agribisnis yakni dibutuhkan pada pengembangan industri pembenihan/pembibitan, industri farmasi, industri makanan/minuman, industri pengolahan limbah biologis, dan lain-lain. Selain itu pengembangan teknologi agro-otomotif dan teknologi agro-kimia juga sangat penting. Dengan kata lain, untuk mengembangkan agribisnis paling sedikit ketiga aspek/bidang teknologi tersebut yakni bioteknologi, teknologi agro-otomotif (mekanika), teknologi agro-kimia (kimiawi) perlu memperoleh prioritas utama.

Selain pengembangan bioteknologi, penerapan teknologi kultur jaringan yang ditujukan untuk mengembangkan bibit/benih unggul juga perlu mendapat perhatian. Hal ini sangat penting, karena bibit/benih merupakan *blue print* atribut nutrisi dari produk-produk agribisnis yang akan dihasilkan. Sebagai contoh, produk mangga dengan atribut manis, harum, kaya vitamin C, kaya serat, secara alamiah (bukan diperkaya), yang dituntut konsumen, hanya dapat dihasilkan bila pada bibit mangga mengandung *blue print* yang demikian. Singkatnya, pengembangan kultur jaringan pada sub-sektor agribisnis hulu ini ditujukan untuk mengembangkan bibit/benih yang mengandung *blue print* atribut produk yang dituntut konsumen, disamping memiliki kemampuan produktivitas tinggi.

Pada subsektor *on-farm agribusiness*, pengembangan teknologi diarahkan pada penggunaan teknologi *eco-farming* dan *organic farming*, seperti teknologi *zero/minimum tillage*, teknologi konservasi tanah dan air, teknologi biologi tanah, teknologi pemberantasan hama dan penyakit tanaman dan hewan secara biologis dan lain-lain. Dengan demikian, komoditas primer yang dihasilkan dari sub-sektor



*on-farm agribusiness* ini memenuhi tuntutan *eco-labeling* dan *food safety*.

Selanjutnya, pengembangan teknologi prosesing dan produk pada sub-sektor agribisnis hilir (agroindustri hilir) diarahkan untuk peningkatan efisiensi, pengembangan diversifikasi teknologi prosesing untuk menghasilkan diversifikasi produk, meminimumkan *waste* dan *pollutan*, pengembangan teknologi produk yang mengakomodir *value attributes* dan *package attributes*.

Dalam upaya mempercepat dan mempertajam visi pengembangan dan pengaplikasian teknologi yang dibutuhkan pada sektor agribisnis ini sudah saatnya kita memiliki "payung" R&D teknologi agribisnis nasional yang diberi prioritas. Dalam hal ini, Badan Litbang Pertanian dapat berperan sebagai perencana, koordinator dan pengevaluasi kegiatan R&D teknologi (*R&D technology management*), sedangkan pelaksanaan R&D teknologi diperankan oleh Pusat-Pusat Penelitian Departemen Teknis (sebagai *center R&D technology*) dan Lembaga/Pusat Penelitian Perguruan Tinggi. Hasil *R&D technology* tersebut selanjutnya didiseminasi dan diaplikasikan pada pengguna langsung oleh balai/sub-balai, UPT penelitian departemen teknis dan divisi R&D usaha-usaha agribisnis. Dengan demikian, keseluruhan kegiatan R&D teknologi yang ada berada pada suatu *network* R&D yang saling mendukung pada pengembangan teknologi yang dibutuhkan oleh sektor agribisnis nasional dalam menjawab tantangan masa depan.

Untuk mendukung *network* R&D teknologi tersebut diperlukan pengembangan sistem teknologi informasi yang berperan untuk mengkomunikasikan informasi pasar produk-produk agribisnis kepada *network* R&D, mengefektifkan arus informasi antar komponen *network* R&D, mengkomunikasikan hasil-hasil R&D kepada pengguna langsung, dan mengkomunikasikan konsep dan atribut produk-produk agribisnis



kepada konsumen (melalui kegiatan *advertising*). Dalam membangun sistem teknologi informasi ini dapat memanfaatkan atau mendayagunakan teknologi internet, media massa dan lain-lain.

### 5.5.3. Pengembangan SDM

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis, SDM tidak hanya sekedar faktor produksi melainkan yang lebih penting lagi adalah pelaku langsung dari pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

Untuk membangun sistem agribisnis, paling sedikit terdapat tiga sasaran penting pengembangan SDM agribisnis di Indonesia. **Pertama** adalah mengembangkan kemampuan penguasaan teknologi dan pengetahuan sehingga searah dengan pengembangan teknologi pada sistem dan usaha agribisnis; **Kedua**, mengembangkan kemampuan kewirausahaan (*enterpreneurship*) sehingga dapat menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang handal/tangguh dan **Ketiga**, mengembangkan kemampuan *team work*. Sumberdaya manusia agribisnis dalam hal ini mencakup SDM agribisnis pelaku langsung seperti tenaga kerja yang bekerja pada sub-sektor agribisnis hulu, sub-sektor *on-farm agribusiness* dan sub- sektor agribisnis hilir, dan SDM agribisnis pendukung sektor agribisnis seperti birokrat pusat hingga ke daerah, SDM perbankan dan SDM penyedia jasa bagi agribisnis.

Karakteristik khusus yang dimiliki sektor agribisnis seperti ketergantungan (*interdepedency*) yang kuat antar sub-sektor, antar unit-unit kegiatan dalam satu sub-sektor atau usaha; karakteristik produk yang merupakan produk biologis, menuntut *teamwork* SDM agribisnis yang harmonis. Berbagai bentuk masalah ketidakefisienan



dan kelambanan perkembangan sektor agribisnis di masa lalu (juga pengalaman agribisnis Amerika Serikat, Australia dan Kanada), banyak bersumber dari ketidakharmonisan SDM atau tidak berjalannya suatu *teamwork* yang harmonis. Pelaku ekonomi pada sub-sektor agribisnis hulu yang cenderung bertindak demi kepentingan sendiri dan tidak melihat konsekuensi perilakunya pada sub-sektor *on-farm agribusiness* dan sub-sektor agribisnis hilir, sering menimbulkan konflik ekonomi dalam sektor agribisnis itu sendiri. Demikian juga pelaku ekonomi pada sub-sistem agribisnis hilir, yang bertindak demi kepentingan sendiri dan tidak melihat konsekuensi tindakannya pada sub-sistem *on-farm agribusiness* juga sering menciptakan konflik ekonomi dalam sektor agribisnis secara keseluruhan. Kondisi ini semakin diperburuk pula oleh kebijakan atau layanan yang disediakan oleh lembaga penyedia jasa sektor agribisnis (pemerintah, perbankan dan lain-lain) yang tidak integratif dilihat dari tuntutan agribisnis sebagai suatu sistem, sehingga sering menciptakan optimisme pada sub-sektor tertentu dan pesimisme pada sub-sektor yang lain. Secara keseluruhan, hal-hal tersebut telah merugikan perkembangan sektor agribisnis dan tentunya juga merugikan semua pelaku agribisnis secara keseluruhan.

Dengan latar belakang pendidikan formal dan pengalaman sumberdaya agribisnis yang bervariasi, memang tidak mudah untuk membangun suatu *teamwork* yang harmonis. Di masa lalu, pada perekrutan SDM perusahaan dan/atau departemen telah dilakukan *on-the job training*. Namun, pembinaan SDM agribisnis yang demikian belum cukup untuk membangun suatu *teamwork* yang harmonis. Untuk membangun suatu *teamwork* yang harmonis dalam pengembangan sektor agribisnis, setiap SDM agribisnis harus memiliki wawasan *cross-job*, wawasan yang luas tentang posisinya dalam perusahaan/departemen, wawasan yang luas tentang perusahaan dalam industri (*micro-behaviour*), wawasan *psychology* dan dinamika



pasar, wawasan tentang posisi sektor agribisnis dalam perekonomian (*macro behaviour*) bahkan wawasan yang luas tentang ekonomi global (*global behaviour*). Untuk memampukan SDM agribisnis yang demikian, diperlukan suatu *on-the job cross training*, selain *on-the job training* yang telah berlangsung selama ini. Esensi dari *cross training* ini adalah untuk membina SDM agribisnis agar memiliki wawasan *how to do each other's job* melalui simulasi *on-the job cross-training exercise*. Untuk itu perlu dirancang kebijakan yang merangsang tumbuhnya lembaga-lembaga penyedia jasa *training* di bidang agribisnis terutama di daerah.

Dalam upaya pengembangan pembinaan SDM agribisnis nasional, kita perlu lebih menajamkan program pembinaan SDM agribisnis dengan mendayagunakan Diklat-Diklat Departemen Teknis, lembaga pengembangan SDM perguruan tinggi dan perusahaan swasta, secara terencana dan terarah. Dalam hal ini, Departemen Tenaga Kerja dapat menjadi koordinator, perencana dan pengevaluasi program pembinaan SDM agribisnis berskala nasional atau global, yang kemudian diterjemahkan pada program-program yang lebih spesifik pada Diklat-Diklat Departemen Teknis dan selanjutnya pada pengembangan SDM pada *level* perusahaan atau pada *level* Balai Penyuluh Pertanian (agribisnis). Dengan perkataan lain, kita memerlukan sistem pembinaan dan pengembangan SDM agribisnis nasional yang mampu meningkatkan wawasan *micro-macro-global behavior* dari SDM agribisnis sedemikian rupa sehingga *teamwork* yang harmonis dapat operasional.

Kualitas dan kemampuan aparat yang mampu meningkatkan kreativitas sumberdaya manusia pelaku agribisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Perkembangan tahapan kemajuan sistem agribisnis sangat tergantung pada tingkat keahlian yang dimiliki oleh pelaku agribisnis. Oleh karena itu perlu dibuat berbagai kebijakan yang dapat



mengefektifkan fungsi penyuluhan dengan sasaran khusus pengembangan sistem dan usaha agribisnis. Sasaran penyuluhan perlu diperluas tidak hanya pada petani, tetapi juga pelaku agribisnis lainnya. Demikian pula lingkup penyuluhan harus mencakup agribisnis hulu, on-farm dan agribisnis hilir (termasuk pemasaran). Disamping itu penyuluhan dalam rangka pengembangan kelembagaan ekonomi petani juga perlu dilakukan. Khusus untuk penyuluhan dengan sasaran petani sebagai salah satu pelaku agribisnis, pendekatan penyuluhan partisipatif perlu dijadikan kebijakan pengembangan penyuluhan.

#### **5.5.4. Pengembangan Organisasi Ekonomi Petani**

Pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang **dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat** disetiap daerah memerlukan pengembangan kelembagaan dan organisasi ekonomi. Akibat paradigma pembangunan dimasa lalu banyak kelembagaan tradisional/lokal yang sebelumnya bagian dari perekonomian lokal menjadi rusak bahkan hilang. Oleh sebab itu, kelembagaan tradisional/lokal perlu dibangkitkan kembali dan didayagunakan untuk pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

Kelembagaan pangan tradisional seperti kelembagaan lumbung desa/keluarga disetiap daerah perlu dikembangkan kembali dan dijadikan sebagai kelembagaan ketahanan pangan (*food security*) nasional. Sistem kelembagaan pangan yang berbasis pada keanekaragaman bahan pangan dan budaya lokal akan mampu menjadi sistem ketahanan pangan nasional yang tangguh dan efisien. Oleh karena itu kelembagaan pangan yang demikian perlu dihidupkan kembali.

Pengembangan organisasi ekonomi rakyat beserta jaringan bisnisnya perlu dikembangkan lebih lanjut. Organisasi ekonomi seperti koperasi agribisnis perlu ditumbuh-kembangkan sebagai organisasi

ekonomi petani. Pengembangan koperasi agribisnis ke depan perlu diarahkan sebagai organisasi ekonomi petani pada sub-sistem agribisnis hilir maupun pada sub-sistem agribisnis hulu dan bukan hanya pada sub-sistem *on-farm*. Koperasi agribisnis pada subsistem agribisnis hilir dan pada sub-sistem agribisnis hulu dapat mengembangkan jaringan usaha (bentuk usaha patungan) dengan perusahaan swasta (PMA, PMDN). Dengan cara pengembangan koperasi agribisnis yang demikian, meskipun petani tetap di pedesaan, namun organisasi ekonominya menjangkau hingga ke negara lain. Sehingga nilai tambah yang ada pada subsistem agribisnis hulu dan subsistem agribisnis hilir dapat dinikmati oleh rakyat di daerah melalui koperasinya. Koperasi agribisnis yang perlu dikembangkan adalah koperasi dari kelompok tani yang tumbuh berdasarkan kesamaan aktifitas dan kepentingan ekonomi dalam kegiatan usaha tani. Oleh karena itu kelompok tani yang telah berfungsi sebagai modal kerjasama, kelas belajar mengajar dan sebagai unit produksi dikembangkan menjadi kelompok usaha yang berwawasan agribisnis dan tumbuh menjadi koperasi agribisnis yang berbadan hukum.

Diharapkan melalui pembangunan koperasi agribisnis yang demikian, industri pupuk, industri agro-otomotif, industri agro-kimia industri pengolahan hasil pertanian, akan ikut dimiliki oleh rakyat banyak melalui koperasinya. Dengan demikian setiap tahapan pembangunan sistem agribisnis, rakyat banyak di daerah juga ikut dalam perubahan yang makin baik tersebut.

## **5.6. Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan**

Pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang mendayagunakan keragaman sumberdaya alam (hayati) tidak akan *sustainable* bila keaneka ragaman hayati tidak dilestarikan. Oleh karena itu upaya pelestarian sumberdaya keragaman hayati perlu



ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

Dalam pelestarian sumberdaya keragaman hayati, perlu dikembangkan bentuk-bentuk pelestarian keragaman hayati, baik dalam bentuk kebun koleksi plasma nutfah maupun pelestarian habitat asli ekosistem tanaman disetiap daerah. Kebun plasma nutfah dan habitat asli tanaman tersebut merupakan *bank genetik* yang berfungsi sebagai penyedia materi genetik untuk memperbaharui dan mendiversifikasi komoditas/produk agribisnis. Kebun plasma nutfah ini perlu dikelola sebagai bagian dari industri pembibitan/perbenihan atau pusat-pusat penelitian bioteknologi.

Selain bentuk-bentuk pelestarian sumberdaya alam dalam bentuk kebun plasma nutfah, pelestarian hutan, tanah, air dan perairan umum juga perlu diperhatikan. Untuk itu, menumbuhkembangkan kelembagaan lokal dan melegalisasi hak ulayat masyarakat lokal perlu diupayakan.

Dalam upaya pelestarian sumberdaya alam, masalah *property right* menjadi sangat penting, karena menyangkut masalah tanggung jawab pelestarian. Selama ini banyak sumberdaya alam seperti hutan tidak jelas pemiliknya, yang ada hanyalah milik negara. Sistem penguasaan milik negara atau milik umum tidak kondusif bagi pelestarian SDA karena terjebak pada apa yang disebut sebagai *tragedy of common* (semua pihak merasa berhak memanfaatkan namun tak seorang pun yang bersedia untuk melestarikannya). Oleh karena itu, bagi SDA yang masih demikian perlu diperjelas pemiliknya sehingga ada yang bertanggung jawab dalam pelestariannya.

Selain itu perlindungan pada lahan pertanian perlu dilakukan. Hal ini penting mengingat sudah sekitar 1 juta hektar lahan sawah produktif di Indonesia beralih fungsi dalam kurun waktu 1983-1993.



Perlindungan lahan pertanian ini juga berkaitan dengan kebijakan makro ekonomi yang menekan agribisnis seperti regim perdagangan yang pro-impor, kebijakan suku bunga yang tinggi, akan membuat lahan pertanian menjadi *under valued* sehingga mudah mengalami alih fungsi. Oleh karena itu kebijakan yang demikian harus dihindari.

Penetapan pajak tinggi pada lahan "tidur" dapat dilakukan secara optimalisasi SDA. Disamping itu pemberian "penghargaan" pada para pelestari SDA dan "sanksi" bagi perusak lingkungan juga perlu dijadikan kebijakan yang dituangkan dalam suatu produk hukum yang mengikat.

Perlindungan lahan pertanian subur seperti lahan sawah perlu mencakup ekosistemnya yakni termasuk wilayah tangkapan air (*catchman area*). Sebab tidak ada gunanya melindungi lahan sawah bila wilayah tangkapan air untuk irigasi dengan mudah beralih fungsi. Oleh karena itu prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam secara integratif perlu dikembangkan.

### **5.7. Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Agribisnis Daerah**

Keseluruhan kebijakan pengembangan sistem dan usaha agribisnis seperti sudah dikemukakan terdahulu secara operasional akan terjadi di daerah karena disanalah basis sumberdayanya.

Untuk mengoperasionalkan pembangunan sistem dan usaha agribisnis, perlu dikembangkan atau diorganisasikan dalam bentuk pusat-pusat pertumbuhan agribisnis di daerah sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah. Pengembangan pusat-pusat agribisnis tersebut harus dikaitkan dengan ekonomi regional sedemikian rupa sehingga secara bertahap agribisnis daerah yang bersangkutan makin terintegrasi dengan perekonomian regional dan dunia. Tentu saja disamping penumbuhan pusat-pusat agribisnis



secara fisik, pengembangan sistem informasi agribisnis juga perlu dilakukan.

Pada pusat-pusat pertumbuhan agribisnis perlu diperlengkapi infrastruktur yang diperlukan seperti jalan baik yang menghubungkan industri pengolahan dengan sub-sistem *on-farm* maupun antar pusat pertumbuhan agribisnis dengan pelabuhan ekspor. Selain itu juga dikembangkan fasilitas pergudangan, terminal agribisnis, dan bursa komoditas/produk agribisnis, beserta fasilitas lain yang diperlukan untuk berkembangnya sistem dan usaha agribisnis.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis daerah ini haruslah inklusif dengan pembangunan daerah yang bersangkutan. Pengembangan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang eksklusif seperti dimasa lalu hendaknya tidak perlu diulang lagi. KAPET yang perlu dikembangkan ke depan adalah KAPET agribisnis yang sangat terintegrasi dengan ekonomi rakyat daerah. Sehingga kehadiran KAPET agribisnis tersebut benar-benar memfasilitasi pengembangan ekonomi daerah. Kapet-kapet agribisnis juga dimaksudkan dapat terbentuk Kawasan Agroindustri Terpadu (KAT), serta pengembangan Sentra Produksi Agribisnis Komoditi Unggulan (SPAKU), dan Kawasan Andalan (KADAL). Pola insentif yang mampu merangsang investasi agribisnis oleh para pengusaha lokal di Kapet-kapet agribisnis tersebut perlu diciptakan, khususnya oleh pemerintah daerah.

### **5.8. Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan**

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1996, tentang Pangan, bahwa pengembangan pangan dan kesejahteraan petani adalah kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah adalah melaksanakan pengaturan



dan pengendalian agar berkembang suatu sistem perusahaan pangan yang adil dan bertanggung jawab.

Ketahanan Pangan adalah terpenuhinya pangan, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun kesesuaian dengan sosio kultur; dapat dijangkau secara fisik maupun ekonomi; dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan individu, setiap waktu, untuk sehat, tumbuh dan produktif. Unsur utama dari ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan yang cukup, distribusi yang menjamin setiap individu dapat mengakses, serta mengkonsumsi yang menjamin setiap individu memperoleh asupan zat gizi dengan jumlah dan keseimbangan yang cukup. Dengan pengertian tersebut, maka agribisnis komoditas pangan yang berbasis sumberdaya pangan lokal, yang menghasilkan, mengolah dan memasarkan berbagai ragam produk pangan serta memberikan pendapatan bagi masyarakat, memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap terwujudnya ketahanan pangan.

Dalam GBHN tahun 1999–2004 diamanatkan sebagai berikut: *"Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan, dan budaya lokal dalam menjamin tersedianya pangan yang terjangkau, dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani/nelayan serta produksi yang diatur dengan undang-undang".*

Komponen dari sistem ketahanan pangan yaitu ketersediaan, distribusi dan konsumsi, tidak lain adalah kegiatan usaha berbasis agribisnis. Berdasarkan hal tersebut, maka peningkatan dan pemantapan ketahanan pangan dilaksanakan dengan pendekatan sistem agribisnis, yang merupakan rangkaian yang terintegrasi antara subsistem hulu, usaha tani, hilir dan subsistem jasa. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan ketahanan pangan diarahkan pada (a) keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal (b)



efisiensi ekonomi dan keunggulan kompetitif wilayah (c) pengaturan distribusi pangan mengacu pada mekanisme pasar yang kompetitif (d) sebagai bagian dari upaya peningkatan pendapatan petani. Mengingat aktor dari sistem ketahanan pangan adalah para pelaku usaha yaitu produsen, pengolah dan distribusi yang sebagian besar pengusaha kecil, maka upaya peningkatan dari pemantapan ketahanan pangan dilaksanakan dalam kerangka memberdayakan kelompok masyarakat agar mampu, mandiri dalam mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, di dalam suatu perekonomian yang mengikuti asas mekanisme pasar yang berkeadilan.

Kebijakan ketahanan pangan adalah kebijakan yang bersifat menyalurkan kegiatan-kegiatan yang menunjang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan, agar setiap individu dapat mengakses pangan dan mengelola konsumsinya untuk memenuhi kecukupan gizi. Dalam hal subsistem ketersediaan pangan, kebijakan yang perlu dilakukan adalah menyalurkan antara produksi, ekspor, impor, dan konsumsi sehingga terjadi keseimbangan sesuai dengan kebutuhannya pada wilayah yang bersangkutan, dan antar wilayah dari waktu ke waktu pada tingkat harga yang proposional. Kebijakan subsistem distribusi pangan diarahkan untuk mendorong kelancaran proses distribusi dari lokasi produsen dengan konsumen sehingga masyarakat di seluruh wilayah dapat mengakses pangan dari waktu ke waktu sesuai yang dibutuhkannya. Demikian pula, kebijakan subsistem konsumsi pangan diarahkan untuk mendorong masyarakat mampu memanfaatkan sumberdayanya untuk memperoleh dan mengonsumsi pangan sehingga setiap individu mendapat asupan zat gizi yang cukup dan seimbang.



## **VI. MANAJEMEN PEMBANGUNAN SISTEM DAN USAHA AGRIBISNIS**

Pembangunan sistem dan usaha agribisnis merupakan tugas yang besar dan kompleks yang melibatkan berbagai instansi dan lembaga terkait sehingga diperlukan sistem manajemen yang baik untuk mengorkestra proses pembangunan secara harmonis.

### **6.1. Peta Kewenangan**

Manajemen pembangunan di pusat dan daerah didasarkan atas kewenangan yang diatur dalam UU No 22/1999 dan PP No 25/2000. Penjabaran program pembangunan sistem dan usaha agribisnis diletakkan sesuai dengan peta kewenangan pemerintah dengan lebih memberikan peluang kepada partisipasi aktif masyarakat.

#### **61.1. Kewenangan Pemerintah Pusat**

Kewenangan pemerintah pusat adalah dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. Hal yang lebih rinci yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Secara garis besar kewenangan pemerintah pusat terbatas kepada penentuan pedoman, norma dan standar teknis.



### **6.1.2. Kewenangan Propinsi**

Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom mencakup bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota serta bidang pemerintahan tertentu lainnya. Selain itu, propinsi dapat melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Kewenangan propinsi mencakup penetapan standar pelayanan teknis, pengawasan dan pendendalian.

### **6.1.3. Kewenangan Kabupaten/Kota**

Sesuai dengan titik berat otonomi daerah pada kabupaten/kota, maka kewenangan yang dimiliki kabupaten/kota lebih banyak bersifat pelaksanaan dan jumlahnya sangat banyak di luar kewenangan yang dimiliki oleh pusat dan propinsi sebagai daerah otonom

## **6.2. Mekanisme Manajemen**

### **6.2.1. Perencanaan**

Mekanisme perencanaan dirancang melalui perpaduan antara mekanisme dari bawah (*bottom up*) dan perencanaan dari atas (*top-down*). Di tingkat Kabupaten dan tingkat propinsi telah dibentuk forum Rapat Koordinasi Pembangunan Pertanian Tingkat II (Rakorbangtan II) dan Rapat Koordinasi Pembangunan Pertanian Tingkat I (Rakorbangtan I). Kedua forum tersebut memerlukan penyesuaian agar substansi yang dibahas secara lintas sub-sektor dan lintas sektor adalah kegiatan-kegiatan pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang akan dilaksanakan.

Perencanaan ditingkat petani dilaksanakan dengan metoda partisipatif, yaitu menempatkan petani sebagai bagian terpenting dalam usaha agribisnis, diberikan kesempatan untuk berperan sebagai pemilik, pelaku dan pengelola usaha agribisnis. Melalui perencanaan



partisipatif, petani terlibat langsung dalam penyusunan Rencana Usaha Agribisnis melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Penyuluh Pertanian.

### **6.2.2. Pengorganisasian**

Di tingkat Pusat perencanaan pembangunan sistem dan usaha agribisnis dikordinasikan oleh Kantor Menteri Koordinator Perekonomian. Di tingkat Pusat perlu segera dibentuk forum yang secara formal mengkoordinasikan berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan agribisnis nasional. Forum dimaksud adalah Forum Kordinasi Pangan dan Agribisnis Nasional (FKPAN) dengan ketua Menko Perekonomian, dan anggota-anggota Mentan, Menperindag, Menegkop, Menkimpraswil, Menkeu, Bappenas, Mendagri-Otda/BPN, Kadin/Kadinda, Menhut, Menaker, dan Asosiasi terkait. Di tingkat daerah perlu dibentuk forum yang sama yaitu Forum Kordinasi Pangan dan Agribisnis Daerah (FKPAD).

Tugas FKPAN adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan sistem dan usaha agribisnis lintas sektor tingkat nasional secara terpadu,
- (2) Mengefektifkan dukungan sektor terkait dalam mewujudkan pembangunan sistem dan usaha agribisnis
- (3) Mencari solusi jika terjadi konflik dalam operasional apabila diperlukan dukungan pemerintah pusat.

Di tingkat daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota), manajemen pembangunan sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis di koordinasikan melalui Forum Kordinasi Pangan dan Agribisnis Daerah (FKPAD) dengan mengikutsertakan Kadinda, Perguruan Tinggi, LSM, dan asosiasi-asosiasi terkait. Tugas FKPAD adalah sebagai berikut:



- 1) Melakukan kordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan pembangunan sistem dan usaha agribisnis lintas sektor di daerah secara terpadu,
- 2) Mengefektifkan dukungan sektor terkait dalam mewujudkan pembangunan sistem dan usaha agribisnis di daerah
- 3) Mensinkronkan operasionalisasi di lapangan.

Keterkaitan kelembagaan dalam pembangunan sistem dan usaha-usaha agribisnis dapat dilihat pada Tabel 6.

### **6.2.3. Pelaksanaan**

Pada hakekatnya, pembangunan sistem dan usaha agribisnis tidak mengenal batas-batas administrasi pemerintahan (kabupaten, propinsi) dan bersifat lintas sektoral. Untuk itu diperlukan adanya sinkronisasi kegiatan pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

Sinkronisasi kegiatan pembangunan sistem dan usaha agribisnis mencakup: (1) Sinkronisasi antar Instansi/Departemen level pusat termasuk dengan perwakilan di Luar Negeri (2) Sinkronisasi kegiatan pembangunan sistem dan usaha agribisnis antara Pusat dan Daerah, (3) Sinkronisasi antar Dinas di Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) di bidang sistem dan usaha agribisnis, dan (4) Sinkronisasi antar daerah/wilayah (antar Propinsi, antar Kabupaten, antara Propinsi dan Kabupaten).

Kegiatan sinkronisasi diarahkan untuk membangun komitmen dari setiap stakeholder dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membangun komitmen adalah: (1) Sosialisasi program pembangunan sistem dan usaha agribisnis, (2) Penyusunan perencanaan terpadu yang disepakati, (3) Membangun *net-working* diantara stakeholders



pembangunan sistem dan usaha agribisnis, dan (4) Penyusunan *action plan* secara terpadu.

Pelaksanaan pembangunan sistem dan usaha agribisnis diserahkan kepada masyarakat sesuai kemampuannya dengan difasilitasi oleh pemerintah yang didukung oleh adanya "*political will*" secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk pembangunan agribisnis berskala luas dalam masyarakat, pemerintah akan mendorong gerakan-gerakan yang tumbuh dari masyarakat melalui upaya pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan menumbuhkan kemandirian petani dalam agribisnis.

Instrumen untuk sinkronisasi pelaksanaan adalah FKPAN dan FKPAD.

#### **6.2.4. Monitoring dan Pengendalian**

Monitoring pada dasarnya adalah suatu pengamatan atau pengecekan terhadap kegiatan, aktivitas, hasil dan dampaknya. Tujuan monitoring adalah untuk: (1) menjamin bahwa masukan (input), jadwal pelaksanaan dan keluaran (output) yang direncanakan berjalan sesuai dengan rencana, (2) menyediakan data penggunaan input, aktivitas, dan hasil, dan (3) menghindari terjadinya penyimpangan terhadap tujuan dan hasil yang diharapkan.

Pengendalian pada prinsipnya adalah merupakan upaya tindakan pengawasan, penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan secara efektif dan efisien.

Monitoring dan pengendalian merupakan bagian dari siklus manajemen perencanaan. Hasil monitoring dan pengendalian bermanfaat sebagai upaya perbaikan bagi kegiatan berjalan dan sekaligus sebagai masukan bagi perencanaan kegiatan ke depan.



Kegiatan monitoring dan pengendalian pembangunan sistem dan usaha agribisnis dilaksanakan oleh setiap tingkatan administrasi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1999. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, monitoring dan pengendalian harus melibatkan semua stakeholders (petani, swasta, masyarakat umum, LSM dan pemerintah) pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

Untuk mendukung kegiatan monitoring dan pengendalian, perlu diwujudkan sistem pelaporan dan evaluasi yang efektif, dalam rangka mengamankan pelaksanaan pembangunan sistem dan usaha agribisnis, serta dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan selanjutnya. Selain itu, perlu ditumbuhkan kegiatan monitoring dan pengendalian partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pembangunan.



Tabel 1 Matriks Keterkaitan Kelembagaan Dalam Pembangunan Sistem Dan Usaha Agribisnis

No	Kebijakan	Instansi															
		Menko Perekonomian	BI	Deptan, Dephut, Kelautan /Kan	KLH/ BPN	Depkes, BSN, Karantina	BPPT/ LIPI	Dep. Per-indag	Kim-praswil	Dep-Naker	Dep. Hub	Dep. Keu	Dep. Kop	Bulog	Pemda /Dep. Dagri	Deplu	Ormas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Makro																
	- Kredit pengembangan usaha agribisnis suku bunga terjangkau	✓	✓	✓								✓	✓				✓
	- Alokasi anggaran untuk membangun sistem dan usaha agribisnis utamanya infrastruktur publik	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓					
	- Perlakuan khusus penerapan keringanan pajak untuk usaha-usaha yang bergerak dalam agribisnis	✓	✓	✓				✓				✓			✓		✓
	- kebijakan untuk menghapuskan retribusi-retribusi yang memberatkan sektor agribisnis	✓		✓				✓			✓	✓			✓		✓
	- kebijakan penghapusan PPN produk agribisnis	✓		✓				✓				✓					✓
	- kebijakan investasi untuk merangsang swasta (PMA, PMDN) di bidang agribisnis	✓		✓				✓				✓			✓	✓	✓
	- Kebijakan pemberian kredit ekspor guna mendorong ekspor agribisnis	✓	✓	✓				✓				✓	✓				✓
	- Kebijakan pajak progresif untuk lahan	✓		✓	✓							✓			✓		✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Kebijakan industri																
	- Kebijakan untuk mendorong pengembangan industri asintan nasional	✓		✓			✓	✓							✓		✓
	- Kebijakan untuk mendorong pengembangan industri pupuk, pestisida, dan obat-obatan			✓			✓	✓							✓		✓
	- Kebijakan untuk mendorong pengembangan industri benih/bibit nasional			✓			✓	✓							✓		✓
	- Kebijakan yang mendorong agroindustri yang lebih hilir untuk meraih nilai tambah			✓			✓	✓							✓		✓
	- Kebijakan untuk mendorong pembentukan kawasan agroindustri terpadu (KAT) di daerah			✓	✓		✓	✓							✓		✓
3	Kebijakan Perdagangan/ Pemasaran																
	- Kebijakan untuk menghapuskan pajak ekspor agribisnis	✓		✓				✓				✓					✓
	- Kebijakan untuk melindungi produk-produk agribisnis domestik secara adil (olahan dan non-olahan) melalui pajak impor (bea masuk) untuk mencapai fair trade, dan non-technical barriers	✓		✓				✓				✓					✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Kebijakan penurunan pajak impor bagi barang-barang modal dan input lain yang diperlukan oleh sektor agribisnis yang belum diproduksi di dalam negeri	✓		✓				✓				✓					✓
	- Kebijakan dalam perbaikan sistem distribusi produk-produk agribisnis domestik			✓				✓			✓	✓			✓		✓
	- Mendorong pembentukan bursa komoditi dan pasar lelang untuk transparansi pembentukan harga ( <i>price discovery</i> )			✓				✓							✓		✓
	Kebijakan penyederhanaan prosedur ekspor guna memacu daya saing ekspor nasional			✓				✓			✓	✓			✓	✓	✓
	- Kebijakan mengefektifkan perwakilan-perwakilan di luar negeri untuk melakukan market intelligence dan promosi agribisnis nasional			✓				✓			✓					✓	✓
	- Kebijakan dalam mendorong kerjasama pemasaran internasional			✓				✓								✓	✓
	- Kebijakan perbaikan struktur pasar domestik			✓				✓					✓		✓		✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Kebijakan Pengembangan Infrastruktur																
	- Kebijakan yang menitikberatkan pengembangan infrastruktur publik mendukung agribisnis terutama di daerah (Irigasi, farm road, air bersih, listrik)	✓		✓			✓	✓	✓						✓		✓
	- Kebijakan yang merangsang partisipasi swasta melakukan investasi di bidang infrastruktur	✓		✓					✓						✓		✓
	- Kebijakan untuk mendorong infrastruktur pasar seperti terminal agribisnis dan pasar lelang			✓				✓	✓				✓		✓		✓
5	Kebijakan Pengembangan Kelembagaan																
	- Kebijakan lembaga keuangan sebagai sumber permodalan usaha agribisnis di daerah	✓		✓								✓			✓		✓
	- Kebijakan pengembangan regional banking system di daerah (deregulasi perbankan)	✓		✓								✓			✓		✓
	- Kebijakan untuk mendorong lembaga-lembaga keuangan lokal yang tumbuh di masyarakat	✓		✓								✓	✓		✓		✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Kebijakan mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga pengawasan/ peningkatan mutu produk-produk agribisnis			✓		✓	✓	✓					✓		✓		✓
6	Kebijakan Pengembangan Inovasi dan Teknologi																
	- Kebijakan untuk mendorong penelitian bidang bioteknologi, organic farming, dan teknologi konservasi tanah dan air sesuai dengan perkembangan pasar dalam meningkatkan produktivitas			✓			✓	✓					✓		✓		✓
	- Kebijakan penguatan kelembagaan penelitian untuk pengembangan teknologi pengolahan dan penunjangnya untuk mendorong nilai tambah			✓			✓	✓							✓		✓
	- Kebijakan peningkatan dana litbang (melalui penerimaan pajak ekspor)			✓			✓	✓					✓		✓		✓
	- Kebijakan yang mendorong penelitian pemasaran di dalam negeri maupun ekspor			✓			✓	✓					✓		✓		✓
	- Kebijakan untuk mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga untuk peningkatan kualitas SDM agribisnis terutama di daerah melalui Diklat			✓				✓					✓		✓		✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Kebijakan untuk menguatkan kelembagaan penyuluhan dengan fokus diperluas dari pertanian ke sistem agribisnis			✓				✓					✓		✓		✓
	- Kebijakan untuk mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga pengolahan di daerah			✓				✓					✓		✓		✓
7	Kebijakan Pengembangan Organisasi Ekonomi Petani																
	- Kebijakan untuk mendorong organisasi ketahanan pangan di daerah-daerah			✓				✓			✓		✓		✓		✓
	- Kebijakan untuk mendorong berkembangnya organisasi ekonomi petani di daerah-daerah			✓									✓		✓		✓
8	Kebijakan Pendayagunaan Sumberdaya alam dan Lingkungan																
	- Kebijakan penerapan reward and punishment untuk penggunaan sumberdaya alam			✓	✓							✓			✓		✓
	- Kebijakan untuk mencegah konversi lahan produktif			✓	✓		✓		✓						✓		✓
	- Penerapan kebijakan pajak tinggi untuk lahan tidur	✓		✓	✓							✓			✓		✓
	- Tinjauan ulang Undang-Undang Pokok Agraria 1960	✓		✓	✓										✓		✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Kebijakan Khusus																
	- Beras	✓		✓				✓				✓	✓	✓	✓		✓
	- Gula	✓		✓				✓				✓	✓		✓		✓
	- Minyak Goreng	✓		✓				✓				✓	✓		✓		✓
	- Pakan	✓		✓				✓				✓	✓		✓		✓
	- Pupuk	✓		✓				✓				✓	✓		✓		✓
	- Sumber Protein Rakyat (daging ayam, telur, susu, kedelai)	✓		✓				✓				✓	✓		✓		✓



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Kebijakan penataan tata ruang wilayah.			✓	✓			✓	✓						✓		✓
9	Kebijakan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Agribisnis Daerah																
	- Kebijakan untuk mendorong pengembangan sentra-sentra komoditi unggulan (SPAKU)			✓				✓	✓		✓		✓		✓		✓
	- Kebijakan untuk mendorong tumbuhnya kawasan agroindustri terpadu (KAT)			✓			✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓
	- Kebijakan untuk mendorong tumbuhnya industri-industri dan jasa penunjang di pusat-pusat pertumbuhan agribisnis tersebut			✓			✓	✓	✓		✓				✓		✓
10	Kebijakan Ketahanan Pangan																
	- Kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan pangan			✓				✓					✓	✓	✓		✓
	- Kebijakan penganeekaragaman produksi pangan			✓					✓					✓			✓
	- Kebijakan kredit ketahanan pangan (KKP)			✓					✓			✓	✓	✓	✓		✓
	- Kebijakan perdagangan			✓					✓				✓	✓	✓		✓
	- Kebijakan penganeekaragaman konsumsi	✓		✓				✓					✓	✓	✓		✓
	- Kebijakan harga dasar gabah	✓		✓				✓					✓	✓	✓		✓
	- Kebijakan distribusi pangan	✓		✓				✓			✓		✓	✓	✓		✓